

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Gambaran Umum Kelurahan Pancoran Mas

###### 4.1.1.1. Batas-Batas dan Luas Wilayah

Kelurahan Pancoran Mas merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kotamadya Depok. Kelurahan Pancoran Mas secara administrasi memiliki luas 473,55 Ha dengan jumlah RT 128 dan RW 20, adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kelurahan Mampang dan Kelurahan Depok Jaya
Sebelah Selatan	: Kelurahan Cipayung dan Kelurahan Ratujuaya
Sebelah Timur	: Kelurahan Depok
Sebelah Barat	: Kelurahan Rangkapan Jaya

Pemanfaatan dan penggunaan lahan di Kelurahan Pancoran Mas bervariasi. Letak Kelurahan Pancoran Mas yang berada ditengah Kota Depok menarik perhatian para pendatang untuk bertempat tinggal di kelurahan ini, sehingga pemanfaatan lahan yang paling banyak adalah untuk pemukiman.

Disamping untuk pemukiman, di Kelurahan Pancoran Mas alokasi pemanfaatan lahan juga banyak digunakan untuk ladang yakni sebanyak 22 Ha. Dari hasil wawancara dengan penduduk setempat diperoleh informasi bahwa ladang yang paling dominan di Kelurahan Pancoran Mas adalah ladang Belimbing yakni mencapai 85%, sisanya adalah tanaman Palawija. Selain itu di Kelurahan Pancoran Mas masih tersedia lahan untuk pertanian. Luasan lahan pertanian dari tahun ke tahun terus menyempit karena penambahan pemukiman penduduk.

Di bawah ini dipaparkan tabel alokasi pemanfaatan lahan yang kutip dari laporan tahunan Kelurahan Pancoran Mas.

Tabel 4.1. Pemanfaatan Lahan di Kelurahan Pancoran Mas

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	345,510
2.	Sawah	15,6
3.	Ladang	22,7
4.	Kolam/ Tambak	0,5
5.	Sungai	5,35
6.	Jalan	2,5
7.	Pemakaman	3,8
8.	Perkantoran	0,6
9.	Sarana Olahraga	2,9
10.	Peribadatan	5,2
11.	Lainnya	34,02

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Pancoran Mas 2009

#### 4.1.1.2. Kondisi Demografis

Data kependudukan sangat diperlukan bagi setiap perencanaan pembangunan, apalagi dimasa yang akan datang, pembangunan akan tertuju pada pembangunan kualitas manusia dan Sumber Daya Manusia, dengan kata lain, pembangunan tertuju pada penduduk dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Begitu juga dengan Program PNPM Mandiri yang selalu menitikberatkan pentingnya pembangunan nasional melalui pemberdayaan masyarakat.

Kelurahan Pancoran Mas merupakan Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Sampai bulan Desember 2009 jumlah penduduk Pancoran Mas tercatat sebesar 12.238 KK atau sekitar 50.015 jiwa, yang terdiri dari 25.844 kaum laki-laki dan 24.171 kaum perempuan. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 704 penduduk pindah dan 531 penduduk datang. Jumlah RT di Kelurahan Pancoran mas adalah sebanyak 128 RT dengan 20 RW. Dari total 20 RW ada 1 RW yang tidak mendapatkan intervensi program PNPM Mandiri Perkotaan karena RW tersebut merupakan kompleks perumahan elit. Berikut ini disajikan Tabel jumlah penduduk:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	50.015
	a. Laki-laki	25.844
	b. Perempuan	24.171
2.	Jumlah KK	12.238
3.	Pindah	704
4.	Datang	531
5.	Jumlah RT	128
6.	Jumlah RW	20

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Pancoran Mas 2009

Lebih jauh uraian tentang jumlah penduduk di Kelurahan Pancoran Mas, berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk berdasarkan usia, yang dikutip dari laporan tahunan Kelurahan Pancoran Mas tahun 2009. 46548

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Usia	Jumlah	%
≤ 5	3.154	6,3
6 – 10	4.055	8,1
11 – 15	3.960	7,9
16 – 20	4.093	8,2
21 – 25	3.963	7,9
26 – 30	3.998	8,0
31 – 35	3.789	7,6
36 – 40	3.883	7,8
41 – 45	3.294	6,6
46 – 50	3.267	6,5
51 – 55	3.290	6,6
56 – 60	3.141	6,3
61 – 65	3.009	6,0
≥ 66	3.119	6,2
Jumlah	50.015	100

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Pancoran Mas 2009

Dari tabel jumlah penduduk berdasarkan struktur usia diatas terlihat bahwa jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan usia di Kelurahan Pancoran Mas cukup merata, tidak terdapat jumlah penduduk yang menonjol dalam suatu kelompok umur tertentu. Hal ini dapat difahami karena rata-rata masyarakat Kelurahan Pancoran Mas sudah sejak lama memakai KB untuk mengatur kelahiran. Jumlah balitanya adalah sebesar 2.687 orang, jumlah remaja yang masih terkategori menjadi tanggungan usia produktif adalah sebesar 12.128 orang, sedangkan usia lansia yang juga terkategori menjadi tanggungan usia kerja berjumlah 5.128 orang. Jadi, jumlah total usia tidak produktif dan menjadi tanggungan usia produktif adalah sebesar 19.943 orang, sedangkan jumlah usia produktif adalah sebesar 36.572 orang. Artinya, jumlah usia yang tidak produktif lebih sedikit daripada jumlah usia produktif, jumlah usia yang menjadi beban tanggungan usia produktif lebih sedikit dibanding jumlah usia produktif. Pertanyaannya adalah apakah semua usia produktif itu terserap oleh lapangan pekerjaan? Atau ada tenaga kerja yang menganggur? Seorang informan dari pejabat kelurahan menyatakan:

*“Jumlah usia produktif di Pancoran Mas memang cukup banyak, akan tetapi mereka banyak juga yang menganggur dan walaupun bekerja, kerjanya serabutan. Mungkin ini yang jadi sebab kelurahan Pancoran Mas dapat intervensi PNPM Mandiri (Gd, 7 Februari 2010).*

Berikut ini dipaparkan tabel jumlah penduduk berdasarkan usia kerja.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja

Usia	Jumlah	%
15 - 25	8.782	17,6
26 - 45	14.967	29,9
46 - 59	9.698	19,4
≥ 60	6.128	12,3
Jumlah	39.575	79,2

*Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Pancoran Mas 2009*

#### 4.1.1.3. Pendidikan

Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam proses pembangunan. Semakin baik kualitas pendidikan suatu daerah dapat dipastikan pembangunan di daerah tersebut akan lebih cepat dibandingkan daerah lain yang kualitas pendidikannya lebih rendah.

Pendidikan yang dimaksud dalam paparan ini adalah jenjang pendidikan yang ditamatkan serta kepemilikan ijazah. Berdasarkan profil Kelurahan Pancoran Mas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berpendidikan SLTP dan sederajat merupakan jumlah terbesar yakni sebesar 12.512 jiwa, sedangkan urutan kedua adalah tamatan Sekolah Dasar dengan jumlah 9.580 jiwa, kemudian berturut-turut adalah lulusan SMA 6.370 jiwa, tidak tamat SD 4.010 jiwa, diploma 906 jiwa, sarjana 803 jiwa, belum sekolah 695 jiwa dan terdapat buta aksara sebesar 137 jiwa (profil Kelurahan Panmas, 2009). Sebagai sebuah kecamatan disebuah kota yang sedang berkembang pesat dan berdekatan dengan Universitas Indonesia, tentu saja angka pendidikan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kelurahan pancoran mas tergolong rendah. Berikut ini disajikan Tabel jumlah penduduk berpendidikan.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum Sekolah	695	1,4
2	Buta Aksara	137	0,3
3	Tidak Tamat SD/ MI	4.510	9,0
4	Tamat SD	14.580	29,2
5	Tamat SLTP Sederajat	16.512	33,0
6	Tamat SLTA Sederajat	11.870	23,7
7	D1/ D2/ D3/ D4	908	1,8
8	Sarjana	803	1,6
Jumlah		50.015	100

*Sumber: Profil kelurahan Pancoran Mas, 2009*

Sedangkan sarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Pancoran Mas relative lengkap dari mulai *play group*, TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi. Berikut disajikan Tabel 8, Pendidikan formal di Kelurahan Pancoran Mas, jumlah tenaga pengajar dan jumlah siswa yang masih aktif dibangku pendidikan. Dari paparan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak didik yang paling banyak adalah di tingkat SD. Sedangkan pada tabel 7 tentang jumlah penduduk berdasarkan pendidikan diketahui bahwa jumlah pendidikan warga Kelurahan Pancoran Mas yang paling banyak adalah tamatan SLTP/ sederajat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tidak semua warga Kelurahan Pancoran Mas menempuh pendidikan di sekolah yang ada dalam kelurahan, banyak yang sekolah diluar. Begitu juga tidak semua anak didik di sekolah yang terdapat dalam kelurahan Pancoran Mas adalah warga Kelurahan Pancoran Mas.

Tabel 4.6. Pendidikan Formal di Kelurahan Pancoran Mas

Nama	Jumlah	Kepemilikan		Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
		Pemerintah	Swasta		
Play Group	5		5	15	105
TK	7		7	21	720
SD/ Sederajat	18	7	11	108	4320
SMP/ Sederajat	11		11	33	1320
SMA/ Sederajat	13		13	40	1560
Perguruan Tinggi	1		1	8	40

Sumber: *Profil Kelurahan Pancoran Mas, 2009*

#### 4.1.1.4. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di kelurahan Pancoran Mas adalah 1 unit Rumah Sakit Umum, 6 unit balai pengobatan, 3 unit apotik, 24 unit posyandu, 1 unit toko obat, 14 tempat praktek dokter, dan 26 rumah bersalin yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh beberapa tenaga medis, antara lain 5 orang dokter umum, 10 orang bidan, 12 orang perawat, dan 4 orang dokter praktek.

Pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh warga berstatus ekonomi lemah kebawah banyak menggunakan fasilitas balai pengobatan, karena biaya yang murah dan dinilai dari pelayanannya yang lebih baik daripada dirumah sakit yang

membutuhkan biaya tinggi namun pelayannya kadang mengecewakan. Berikut ini disajikan tabel Prasarana dan sarana kesehatan.

Tabel 4.7. Prasaran Dan Sarana Kesehatan

<b>Prasarana Kesehatan</b>	
Rumah Sakit Umum	1 Unit
Poliklinik/ Balai Pengobatan	6 Unit
Apotik	3 Unit
Posyandu	24 Unit
Toko Obat	1 Unit
Jumlah rumah sakit/ Praktek Dokter	14 Unit
Rumah Bersalin	26 Unit
<b>Sarana Kesehatan</b>	
Jumlah Dokter Umum	5 Orang
Bidan	10 Orang
Perawat	12 Orang
Jumlah Dokter Praktek	4 Orang

Sumber: Profil kelurahan Pancoran Mas, 2009

#### 4.1.1.5. Mata pencaharian pokok

Pekerjaan masyarakat kelurahan Pancoran Mas bervariasi, yang tercatat pada profil kelurahan diantaranya adalah seperti tabel berikut:

Tabel 4.8. Jenis mata pencaharian kelurahan Pancoran Mas

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Petani	1.717	3,4
2	Buruh Tani	3.216	6,4
3	Usaha Industri	101	0,2
4	Buruh Industri	6.706	13,4
5	Pekerja Bangunan	4.710	9,4
6	Pekerja Angkutan	28	0,06
7	Tenaga Penjualan	5.075	10,1
8	Pekerja Jasa	13.213	26,4
9	Profesional Tatalaksana (PNS, ABRI)	2.273	4,5
Jumlah		37.039	73,86

Sumber: Diolah dari profil kelurahan Pancoran Mas, 2009

#### **4.1.1.6. Kondisi Lingkungan**

Karakteristik fisik Kelurahan Pancoran Mas sebagian besar masih memperhatikan, yakni masih banyaknya perumahan semipermanen, jaringan jalan yang masih berupa jalan tanah, penduduk sebagian besar belum memiliki sarana air bersih dan MCK. Kondisi ini sangat memperhatikan sebab posisinya berada diwilayah Jabodetabek yang menjadi pusat perekonomian Indonesia.

Namun demikian, kondisi ini menjadi pemicu semangat bagi masyarakat Kelurahan Pancoran Mas untuk membangun kelurahannya ke arah yang lebih baik, hal ini dapat dicontohkan ketika setiap ada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan masyarakat yang hadir sangat banyak, kerja keras dan tanpa pamrih untuk mensukseskan kegiatan (PJM Pronangkis Pancoran Mas, 2009)

#### **4.1.1.7 Kondisi Kemiskinan**

Kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Pancoran Mas merupakan kemiskinan yang sangat kompleks dimana kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti kondisi wilayah, taraf hidup yang masih tidak layak, tingkat pendidikan yang mayoritas masih berpendidikan sekolah dasar.

Secara umum, penyebab kemiskinan, dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu faktor internal dan eksternal (PJM Pronangkis Pancoran Mas, 2009). Faktor internal adalah penyebab kemiskinan yang ditimbulkan oleh pribadi mereka sendiri seperti rasa malas, rendah diri, keterbatasan dalam pergaulan, sehingga menjadi penghalang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan faktor eksternal yaitu penyebab kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh luar seperti arus modernisasi, kebijakan pemerintah, resesi ekonomi, bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Namun demikian keadaan yang terjadi dirasakan oleh mereka disebabkan oleh lunturnya nilai-nilai kemanusiaan sehingga kondisi yang terjadi dan dialami lebih disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri baik langsung maupun tidak langsung disadari maupun tidak disadari. Berikut ini disajikan rincian penyebab kemiskinan di kelurahan Pancoran Mas:

1. Masih adanya mitos atau anggapan bahwa kemiskinan adalah takdir dan diwariskan secara turun temurun sehingga menimbulkan rasa malas untuk berusaha disamping SDM yang terbatas.



2. Tingkat pendapatan keluarga yang tidak mencukupi untuk membiayai hidup dan anak usia sekolah, sehingga masih banyak anak yang putus sekolah dan tidak dapat sekolah.
3. Rendahnya pendidikan usia angkatan kerja sehingga tersisih dalam persaingan bursa kerja.
4. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi, sekitar 50 % dari angkatan kerja yang ada. Disamping faktor pendidikan, mereka juga belum mempunyai keterampilan/ skill yang menunjang sehingga kalah dalam persaingan. Kondisi lingkungan (sarana dan prasarana) kurang memadai sehingga masih terlihatnya lingkungan yang kumuh dan kotor.

Berikut ini disajikan Tabel 11. Monografis Kemiskinan di Kelurahan Pancoran Mas.

Tabel 4.9. Jumlah Penduduk Miskin di Kelurahan Pancoran Mas

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Laki-laki	2.723	5,5
2	Perempuan	3.118	6,2
3	Jumlah	5.841	11,7

Sumber: profil kelurahan Pancoran Mas, 2009

#### 4.1.2. Gambaran Umum Kelurahan Ratujuaya

##### 4.1.2.1. Kondisi Geografis

Kelurahan Ratujuaya secara administrasi memiliki luas 237,89 Ha dengan jumlah RT 52 dan RW 9, batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Pancoran Mas/ Kelurahan Depok

Sebelah Selatan : Kelurahan Bojong Pondok Terong dan Kelurahan Pondokjaya.

Sebelah Timur : Sungai Ciliwung

Sebelah Barat : Kelurahan Cipayung

Kelurahan Ratujaya dengan Kelurahan Pancoran Mas adalah dua Kelurahan yang saling bertetangga sehingga alokasi pemanfaatan dan penggunaan lahannya tidak jauh berbeda. Letak Kelurahan Ratujaya yang berada ditengah Kota Depok menarik perhatian para pendatang untuk bertempat tinggal di kelurahan ini, sehingga pemanfaatan lahan yang paling banyak adalah untuk pemukiman yakni seluas 152,32 Ha/m<sup>2</sup>.

Disamping untuk pemukiman, di Kelurahan Ratujaya alokasi pemanfaatan lahan juga banyak digunakan untuk pertanian yakni sebanyak 42 Ha/m<sup>2</sup>. Tanaman pertanian yang paling dominan adalah tanaman Palawija. Seperti di Kelurahan Pancoran Mas luasan lahan pertanian dari tahun ke tahun terus menyempit karena pertambahan pemukiman penduduk. Di Kelurahan Ratujaya juga terdapat alokasi lahan untuk perusahaan seluas 3,57 Ha/m<sup>2</sup>. Perusahaan tersebut tidak banyak menyerap tenaga kerja karena perusahaan itu adalah perusahaan penyimpanan gerbong kereta api. Berikut dipaparkan tabel 10, alokasi pemanfaat dan penggunaan lahan di kelurahan Ratujaya.

Tabel 4.10. Alokasi Pemanfaatan dan penggunaan lahan

No.	Alokasi Penggunaan Lahan	Luas (Ha/m <sup>2</sup> )
1.	Perumahan/ pemukiman	152,32
2.	Perusahaan	3,57
3.	Pertanian	42
4.	Sarana olahraga	8,44
5.	Sarana Ibadah	11,365
6.	Sarana umum/ Jalan	3,5
7.	Lainnya	15

Sumber: *Profil kelurahan Ratujaya, 2009*

Sistem pemerintahan Kelurahan Ratujaya dipimpin oleh Kepala Kelurahan dan para stafnya yang biasa disebut dengan aparat kelurahan. Sedangkan untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya ke masyarakat, aparat desa dibantu oleh perangkat lurah, yaitu para ketua RW dan ketua RT. Saat ini Kepala Desa dijabat

oleh Bapak Ujang Salahuddin dengan aparat Kelurahan berjumlah sekitar 40 orang.

Untuk pembangunan kelurahan di lakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Hanya saja LPM ini tidak berjalan efektif. Berdasarkan informasi yang kami terima tidak efektifnya jalan LPM ini adalah karena minimnya anggaran. Untuk kesenian dan keterampilan ada lembaga PKK yang cukup aktif dengan 10 orang anggota.

Program-program yang terkait dengan remaja dan pemuda didominasi oleh aktivitas karang taruna. Karang taruna cukup aktif jika ada kegiatan-kegiatan hari besar nasional atau hari besar keagamaan. Berikut ini dipaparkan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Ratujaya

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Ratujaya, yaitu:

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Tim penggerak PKK Masyarakat
- Lembaga Keswadayaan Masyarakat
- Karang Taruna Tingkat Kelurahan
- POKDAR Kamtibmas
- UPS Kelurahan
- Satgas Kelurahan Siaga
- Satgas RW Siaga

#### **4.1.2.2. Kondisi Demografis**

Sampai bulan Desember 2009 jumlah penduduk Ratujaya tercatat sebesar 6.655 KK atau sekitar 24.599 jiwa, yang terdiri dari 12.750 laki-laki dan 11.849 perempuan. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 173 penduduk pindah dan 351 penduduk datang. Jumlah kelahiran mencapai 549 sedangkan yang meninggal adalah sebesar 175 orang. Berikut disajikan tabel 13 kondisi Demografis Kelurahan Ratujaya:

Tabel 4.11. Data Umum Kependudukan

<b>Keadaan Demografi</b>	<b>Ratujaya</b>
Jumlah Penduduk	24.599
Laki-laki	12.750
Perempuan	11.849
KK	6.655
Lahir	549
Datang	351
Meninggal	175
Pindah	173

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Ratujaya 2009

Sedangkan data kependudukan berdasarkan kelompok umur disajikan seperti tabel 14 di bawah ini.

Tabel 4.12. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur tahun 2008

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
≤5	1.247	5,1
5 - 10	2.266	9,2
11 - 15	1.979	8,0
16 - 20	1.884	7,7
21 - 25	2.219	9,0
26 - 30	2.837	11,5
31 - 35	2.718	11,0
36 - 40	2.303	9,4
41 - 45	2.124	8,6
46 - 50	1.636	6,7
51 - 55	1.215	4,9
56 - 60	831	3,4
≥ 61	1.341	5,5
Jumlah	24.599	100

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Ratujaya 2009

Dari tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur diatas terlihat bahwa jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan usia di Kelurahan Ratujaya cukup merata, tidak terdapat jumlah penduduk yang menonjol dalam suatu kelompok umur tertentu. Seperti di Kelurahan Pancoran Mas rata-rata masyarakat Kelurahan Ratujaya sudah sejak lama memakai KB untuk mengatur kelahiran. Jumlah balitanya adalah sebesar 1.247 orang, jumlah remaja yang masih terkategori menjadi tanggungan usia produktif adalah sebesar 7.376 orang, sedangkan usia lansia yang juga terkategori menjadi tanggungan usia kerja berjumlah 1.361 orang. Jadi, jumlah total usia tidak produktif dan menjadi tanggungan usia produktif adalah sebesar 8.737 orang, sedangkan jumlah usia produktif adalah sebesar 15.883 orang. Artinya, jumlah usia yang produktif mencapai hampir separoh jumlah usia tidak produktif. Hanya saja kondisinya tidak berbeda jauh dengan di Kelurahan Pancoran Mas, apakah semua usia produktif itu terserap oleh lapangan pekerjaan? Oleh karena usia kerja yang tersedia banyak yang tidak terserap dilapangan pekerjaan maka beban tanggungan kelompok yang bekerja menjadi semakin berat. Bukan saja menanggung beban mereka yang belum bekerja atau lansia tetapi juga menanggung beban mereka yang sudah memasuki usia kerja tetapi belum bekerja. Hal inilah yang menjadi alasan masuknya intervensi program P2KP ke Kelurahan Ratujaya bahkan lebih awal ketimbang Kelurahan Pancoran Mas. Jika usia kerja yang ada dipilah lagi berdasarkan kelompok umur tertentu, maka hasilnya adalah seperti tabel 15.

Tabel 4.13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja:

Usia	Jumlah	%
19 - 25	4.103	16,7
26 - 45	9.982	40,6
46 - 59	3.682	15,0
Jumlah	17.767	72,3

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Ratujaya 2009

### 4.1.2.3 Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud dalam paparan ini adalah jenjang pendidikan yang ditamatkan warga serta kepemilikan ijazah. Berdasarkan profil Kelurahan Ratujaya dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang menempuh pendidikan formal adalah sebanyak 15.960 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak menempuh pendidikan/ tidak melek huruf adalah sebesar 3.938 orang.

Dari informasi berdasarkan profil kelurahan Ratujaya tentang pendidikan dapat diketahui bahwa pendidikan SLTA dan sederajat merupakan jumlah terbesar yakni sebesar 8.312 jiwa, sedangkan urutan kedua adalah tamatan Sekolah Dasar dengan jumlah 3.952 jiwa, kemudian berturut-turut adalah lulusan SD/ MI sebesar 2.153 jiwa, sarjana strata I sebanyak 755 jiwa, D1/ D2/ D3/ D4 sebanyak 236 jiwa dan sarjana strata II sebanyak 52 jiwa (Profil Kelurahan Ratujaya, 2009). Angka tidak melek hurufnya mencapai 3.938, sebagai sebuah kecamatan dikota yang sedang berkembang pesat, tentu saja angka pendidikan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Ratujaya tergolong rendah. Berikut ini disajikan Tabel 16, pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Tabel 4.14. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan :

No.	Pendidikan Penduduk	Jumlah	%
1	Tidak Sekolah/melek huruf	3.938	16,0
2	Tamat SD/ MI	4.354	17,7
3	Tamat SLTP (SMP/ Tsanawiyah)	5.952	24,2
4	Tamat SLTA (SMA/ SLTA Kejuruan)	9.312	37,9
5	D1/ D2/ D3/ D4	236	0,9
6	Sarjana Strata 1	755	3,1
7	Sarjana Strata 2	52	0,2
Jumlah		24.599	100

Sumber: Laporan Tahunan Kelurahan Ratujaya 2009

Sedangkan sarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Ratujaya diantaranya TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas sedangkan Perguruan Tinggi tidak ada di Kelurahan Ratujaya. Berikut disajikan Tabel 17, Pendidikan formal di Kelurahan Ratujaya, jumlah tenaga pengajar dan jumlah siswa yang masih aktif dibangku pendidikan.

Tabel 4.15. Lembaga Pendidikan yang ada di Kelurahan Ratujaya

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Siswa/ Mahasiswa	Dosen/ Guru
1	Taman Kanak-kanak	6	130	12
2	SD/ Sederajat	6	1.826	42
3	SLTP/ Sederajat	2	182	12
4	SLTA/ Sederajat	1	314	26
5	Perguruan Tinggi	-	-	-
6	Lembaga Pendidikan Agama/ TPA	7	176	15

Sumber: *PJM Pronangkis Kelurahan Ratujaya, 2009*

Dari paparan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak didik yang paling banyak adalah di tingkat SD. Sedangkan pada tabel 14 tentang jumlah penduduk berdasarkan pendidikan diketahui bahwa jumlah pendidikan warga Kelurahan Ratujaya yang paling banyak adalah tamatan SLTA/ sederajat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebagian warga Kelurahan menempuh pendidikan setingkat SLTA diluar Kelurahan Ratujaya. Begitu juga tidak semua anak didik yang sekolah di kelurahan Ratujaya adalah warga Kelurahan Ratujaya.

#### 4.1.2.4. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di kelurahan Ratujaya adalah 4 unit balai pengobatan, 2 unit apotik, 18 unit posyandu, 1 unit toko obat, 7 tempat praktek dokter, dan 17 rumah bersalin yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh beberapa tenaga medis, antara lain 5 orang dokter umum, 9 orang bidan, 12 orang perawat, dan 3 orang dokter praktek.

Tidak berbeda dengan di Kelurahan Pancoran Mas pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh warga berstatus ekonomi lemah kebawah banyak menggunakan

fasilitas balai pengobatan, karena biaya yang murah dan dinilai dari pelayanannya yang lebih baik daripada dirumah sakit yang membutuhkan biaya tinggi namun pelayannya kadang mengecewakan. Di Kelurahan Ratujaya kebetulan sarana Rumah Sakit tidak ada. Berikut ini disajikan tabel Prasarana dan sarana kesehatan.

Tabel 4.7. Prasaran Dan Sarana Kesehatan

<b>Prasarana Kesehatan</b>	
Rumah Sakit Umum	-
Poliklinik/ Balai Pengobatan	4 Unit
Apotik	2 Unit
Posyandu	18 Unit
Toko Obat	1 Unit
Jumlah rumah sakit/ Praktek Dokter	7 Unit
Rumah Bersalin	17 Unit
<b>Sarana Kesehatan</b>	
Jumlah Dokter Umum	5 Orang
Bidan	9 Orang
Perawat	12 Orang
Jumlah Dokter Praktek	3 Orang

Sumber: Profil kelurahan Ratujaya, 2009

#### 4.1.2.5. Mata Pencaharian Penduduk

Dari data profil Kelurahan Ratujaya dapat diketahui bahwa sebanyak 7.717 orang mempunyai pekerjaan dengan berbagai macam jenisnya. Dari data tersebut tidak dijelaskan berapa jumlah yang bekerja tetap dan bekerja yang tidak tetap. Jumlah yang 7.717 orang itu dapat dirinci diantaranya: sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 806 orang, TNI/ POLRI sebanyak 244 orang, pegawai swasta sebanyak 720 orang, dagang, 2373 orang, tani 269 orang wiraswasta 3305.

Berdasarkan rincian pekerjaan tersebut, dapat dikemukakan disini bahwa pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk kelurahan bervariasi. Akan tetapi mata pencaharian yang dominan adalah dagang dan wiraswasta seperti layaknya kelurahan dengan tipologi perkotaan lainnya. Jumlah penduduk yang bermata pencaharian wiraswasta merupakan jumlah terbanyak. Hanya saja tidak ada penjelasan rinci kategori wiraswastanya. Mestinya sebagai kelurahan dengan tipologi perkotaan maka jenis wiraswasta yang dominan adalah jasa. Sejauh pengamatan penulis dilapangan, usaha jasa yang banyak dilakukan warga



diantaranya menjahit/ permak, dekorasi, tata hias, bengkel mobil/ motor, service elektronik, juga ada jasa sewa mobil dll. Berikut ini disajikan tabel 18, mata pencaharian penduduk Kelurahan Ratujaya

Tabel 4.16. Jenis Matapencaharian Penduduk

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Petani	71	0,3
2	Buruh Tani	1.204	4,8
3	Usaha Industri	85	0,3
4	Buruh Industri	1.720	6,9
5	Pekerja Bangunan	65	0,3
6	Pekerja Angkutan	105	0,4
7	Tenaga Penjualan	4302	17,5
8	Pekerja Jasa	6115	24,9
9	Profesional Tatalaksana (PNS, ABRI)	1050	4,3
Jumlah		13.717	62,3

Sumber: *Profil Kelurahan Ratujaya, 2009*

#### 4.1.2.6. Kondisi Sosial Budaya

Secara umum, kondisi sosial budaya di Kelurahan Ratujaya cukup baik, hal ini dilihat dari hubungan antar lembaga masyarakat yang ada saling bekerjasama dalam membangun wilayah Kelurahan. (Riview PJPM Pronangkis Ratujaya 2009).

Pada umumnya masyarakat Kelurahan Ratujaya terdiri dari bermacam-macam suku. Suku yang paling dominan di Kelurahan Ratujaya adalah Suku Melayu Betawi 8.059 orang, kedua Suku Jawa dengan jumlah 1.746 orang selanjutnya Suku Sunda dengan jumlah 821 orang dan sisanya yang lainnya. Namun demikian tingkat kerukunan dan solidaritas warga cukup baik, yang ditandai dengan tingginya partisipasi warga dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Adapun untuk tertib administrasi, belum semua warga memiliki KTP ataupun kartu KK. Dari wawancara dengan pihak kelurahan yang tidak punya KTP ataupun KK berasal dari golongan yang cukup beragam. Bukan hanya golongan miskin yang tidak punya KTP atau KK akan tetapi juga ada yang berasal dari golongan menengah. Alasannya beragam: yang berasal dari kalangan menengah beralasan malas mengurus, sedangkan yang berasal dari kalangan miskin tidak punya keinginan untuk mengurus administrasi karena khawatir akan banyak tagihan-tagihan.

#### **4.1.2.7. Kondisi Kemiskinan**

Berbagai permasalahan warga berdasarkan hasil kajian pada pemetaan swadaya di Kelurahan Ratujaya diketahui bahwa penyebab kemiskinan ada dua faktor yaitu faktor dari dalam orang miskin itu sendiri dan dari luar seperti kebijakan pemerintah. Secara garis besar masalah masyarakat miskin yang terlihat adalah bahwa masyarakat miskin kurang mempunyai akses kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sarana prasarana yang kurang mendukung sebagai layaknya manusia. Sehingga kemiskinan di Kelurahan Ratujaya didefinisikan sebagai keadaan warga dimana dia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sebagai manusia secara layak dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan dan permukiman. Diantara faktor penyebab kemiskinan di Kelurahan Ratujaya adalah sebagai berikut:

1. Upah buruh rendah
2. Pangan seadanya sehingga kurang gizi.
3. Tidak mampu menyekolahkan anak
4. Malas tidak mau berusaha
5. Kurang kemampuan dan keterampilan
6. Kurang lapangan pekerjaan
7. Sakit-sakitan dan tidak mampu berobat
8. Aturan kebijakan yang tidak tepat dan kurang terbuka

Pada dasarnya program pemberantasan kemiskinan di Kelurahan Ratujaya sudah ada yaitu program P2KP yang dilaksanakan secara partisipatif yang dimotori oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dimulai tahun

1999. Sampai saat ini program penanggulangan kemiskinan yang masih berjalan melalui LKM ini yaitu pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pembangunan lingkungan dan sosial. Sedangkan kredit usaha bagi warga miskin sudah tidak ada lagi dikarenakan terjadinya kemacetan (Review PJM Pronangkis tahun 2009).

Adapun jumlah penduduk miskin di Kelurahan Ratujaya di sajikan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17. Jumlah Penduduk Miskin di Kelurahan Ratujaya

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Laki-laki	1.726	7,0
2	Perempuan	2.080	8,6
3	Jumlah jiwa miskin	3.806	15,6

Sumber: profil kelurahan Pancoran Mas, 2009

## 4.2. Gambaran Umum Program PNPM Mandiri

### 4.2.1. Latar Belakang Kelahiran PNPM Mandiri

Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat dimasa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM/ LKM) dibentuk melalui kesadaran masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat.

BKM/LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Tiap BKM/LKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM dan Renta Pronangkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan diwilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, LKM-LKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.

Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini telah terbentuk sekitar 6.405 LKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM diseluruh Indonesia.

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun 2007, PNPM Mandiri diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals (MDGs)* sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan dan nama generik lembaga kepemimpinan masyarakat berubah dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) menjadi LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

#### 4.2.2. Organisasi Pelaksana PNPM Mandiri

Organisasi pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan merupakan suatu bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

Penyelenggaraan program PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai tingkat kelurahan.

##### 4.2.2.1. Tingkat Nasional

Penanggungjawab pengelolaan program tingkat nasional PNPM Mandiri Perkotaan adalah Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (*executing agency*) yang dalam pelaksanaannya Menteri Pekerjaan Umum membentuk organisasi dan tata kerja Unit Manajemen Program P2KP (PMU-P2KP) melalui surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum, nomor: 358/KPTS/M/2008 tentang organisasi dan tata kerja Unit Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU-P2KP). PMU P2KP bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan pembinaan teknis.

##### 4.2.2.2. Tingkat Provinsi

Ditingkat Provinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui Bappeda Provinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait daerah sebagai pelaksana ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum bidang Kecipta Karya dibawah koordinasi SNVT (Satker Non Vertikal Tertentu) PBL tingkat provinsi.

##### 4.2.2.3. Tingkat Kabupaten/ Kota

Ditingkat Kota/ kabupaten dikoordinasikan langsung oleh walikota/ bupati setempat melalui Bappeda Kota/ Kabupaten dengan menunjuk Tim koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP). Pemkot/ kab dibantu oleh setker Kota/ Kabupaten yang diangkat menteri PU atas usulan Bupati/ Walikota. Dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan ditingkat Kota/ Kabupaten akan dilakukan oleh

Koordinator Kota (Korkot) yang dibantu beberapa asisten korkot di bidang manajemen keuangan, teknik/ infrastruktur, manajemen, data dan penataan ruang.

#### 4.2.2.4. Tingkat Kecamatan

Di tingkat Kecamatan unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah camat dan perangkatnya; dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

##### a. Camat

Peran pokok camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya.

##### b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Kepala Satker PBL atas usulan walikota/ bupati untuk pengendalian kegiatan ditingkat kelurahan dan berperan sebagai penanggung jawab administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya.

#### 4.2.2.5. Tingkat Kelurahan

Di tingkat kelurahan unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah (1). Lurah/ kepala desa dan perangkatnya; (2) Relawan masyarakat dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

##### 1. Lurah

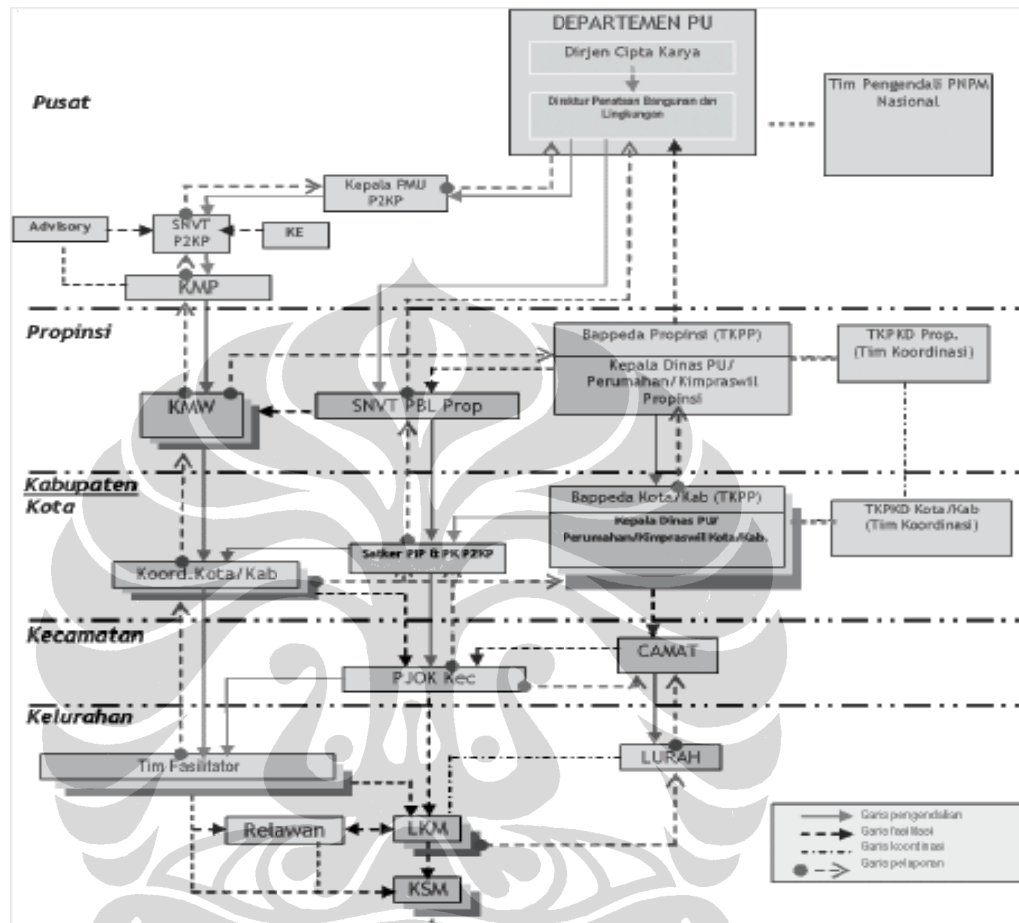
Secara umum peran utama kepala kelurahan adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat tercapai dengan baik.

##### 2. Relawan Masyarakat

Kehadiran relawan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai konsekwensi logis dari penerapan pembangunan yang berbasis masyarakat yang membutuhkan penggerak-penggerak dari masyarakat sendiri yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Proses pembangunan yang berbasis masyarakat tidak akan terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut merupakan individu-individu yang bekerja dengan pamrih pribadi. Dengan kata lain perubahan

masyarakat sangat ditentukan oleh relawan-relawan yang memiliki moral baik dan mampu menjadi contoh perubahan.

Secara jelas berikut digambarkan organisasi pelaksana program PNPM Mandiri yang dipublikasikan di Pedum PNPM Mandiri tahun 2007.



Gambar 4.1. Organisasi pelaksana Program PNPM Mandiri Perkotaan

#### 4.2.3 LKM dan KSM

Pengorganisasian masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perkotaan adalah upaya terstruktur untuk menyadarkan masyarakat akan kondisi yang dihadapi, potensi yang mereka miliki dan peluang yang ada pada mereka. Pengorganisasian masyarakat tidak diartikan sebagai membentuk wadah organisasi, tetapi lebih merupakan kesepakatan bersama untuk bersatu sebagai sesama warga masyarakat disuatu kelurahan untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan sebagai sebuah gerakan moral. Untuk memimpin gerakan

penanggulangan kemiskinan inilah diperlukan pimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak yang tidak parsial, tidak mewakili golongan tertentu dan juga tidak mewakili wilayah tertentu. Oleh karena itu, maka konsep lembaga kepemimpinan pada program PNPM Mandiri adalah berbentuk dewan sehingga tidak ada kekuasaan individu. Lembaga kepemimpinan inilah yang kemudian diharapkan mampu memimpin masyarakat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan secara terorganisir. Lembaga kepemimpinan itu kemudian dikenal sebagai Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan yang semula bernama P2KP dilapangan melibatkan berbagai pihak, antara lain fasilitator, aparat pemma dan masyarakat. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan upaya memasyarakatkan program ke masyarakat, dilakukan penyebaran informasi melalui media seperti poster dan folder serta informasi langsung yang dapat diberikan oleh fasilitator kelurahan. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat kelurahan yang bersangkutan dapat mengetahui dan memahami berbagai persyaratan yang diperlukan bagi tiap warga yang berkepentingan untuk menjadi peserta.

Tujuan dari penyerbarluasan informasi ditahap awal program adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program sehingga dapat memahami dan mampu melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab serta untuk menanamkan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan kegiatan. Adapun materi yang disampaikan meliputi gambaran umum program, proses pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan KSM beserta kemudahan dan kesulitan yang dihadapi oleh setiap jenis kegiatan.

Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat langkah pertama yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah dan Fasilitator Kelurahan adalah melakukan sosialisasi program pada tingkat kecamatan. Sosialisasi ini diikuti oleh wakil dari setiap kelurahan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan.

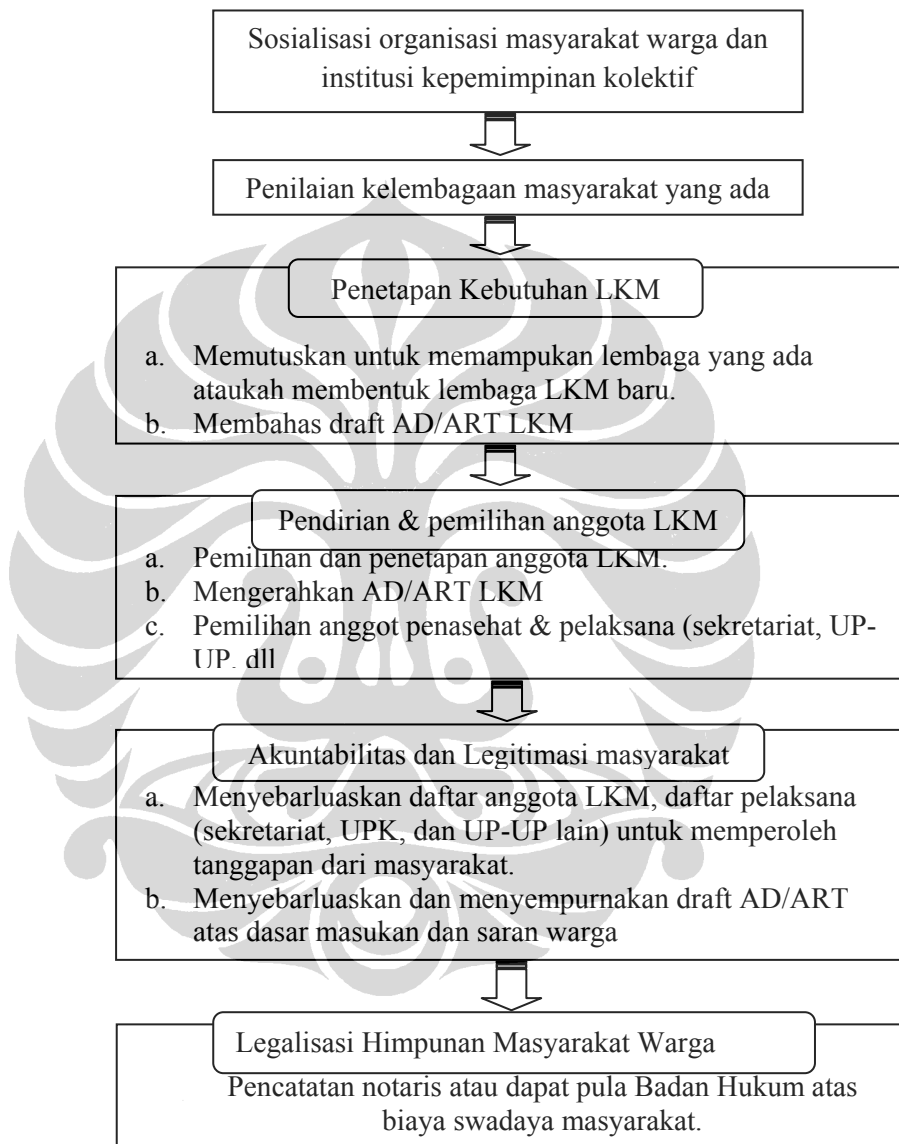
Setelah pertemuan di tingkat kecamatan dilakukan tindaklanjut dengan pertemuan wakil-wakil setiap RW di masing-masing kelurahan. Aparat kelurahan



mengundang para tokoh masyarakat, pengurus RT/RW kader masyarakat, kader PKK untuk mendapatkan informasi lebih mengenai P2KP.

#### 4.2.3.1. Pembentukan LKM

Secara sederhana pembentukan LKM dapat disajikan dalam gambar 3.1.



Gambar 4.1. Proses Pembentukan LKM

Berdasarkan diagram alur pembentukan LKM yang sudah dipaparkan sebelumnya, hasil sosialisasi yang sudah dilakukan ditingkat kecamatan, ditindaklanjuti di tingkat kelurahan. Aparat kelurahan mengundang para pengurus

RT dan RW, tokoh masyarakat, kader PKK untuk sesekali lagi mendengarkan penjelasan mengenai program dari fasilitator kelurahan. Pada pertemuan tersebut dijelaskan langkah-langkah pelaksanaan proyek, yang diantaranya adalah pembentukan Lembaga Keswadayaan masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat. Pada pertemuan tersebut selain aparat kelurahan dan utusan dari RT dan RW juga hadir utusan dari KMW (Koordinator Manajemen Wilayah) dan PJOK Kecamatan.

Rapat tersebut membahas mengenai format bentukan LKM, apakah berbentuk lembaga yang sudah ada seperti Majelis Ta'lim, lembaga kepemudaan dll atau diputuskan sebagai sebuah lembaga baru.

Setelah itu dilaksanakan pemilihan pengurus secara terbuka. Sebelum pemilihan dimulai, disepakati terlebih dahulu mengenai kriteria anggota LKM yang akan dipilih sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam buku panduan yakni jujur, memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Setelah kriteria itu disepakati, maka pemilihan dilakukan dengan cara voting, untuk memilih pimpinan kolektif dengan jumlah ganjil, berkisar antara 9 orang sampai 17 orang. Jumlah pimpinan kolektif tidak boleh genap, untuk menghindari terjadinya kebuntuan dalam pengambilan keputusan, jika terjadi pengambilan dengan cara voting. Setelah pimpinan kolektif terpilih, maka dibentuk Unit pelaksana kegiatan, diantaranya Unit Pelaksana Keuangan (UPK), Unit Pelaksana Sosial (UPS), Unit Pelaksana Lingkungan (UPL), dan sekretaris. UP-UP tersebut orang-orangnya ditunjuk LKM. Keberadaan UP berperan sebagai pelaksana teknis dilapangan sedangkan keputusan strategis ada pada pimpinan kolektif LKM. Pimpinan kolektif LKM sewaktu-waktu juga dapat menghapus UP dalam struktur LKM jika dirasakannya perannya sudah tidak lagi diperlukan.

Setelah struktur LKM terbentuk, maka langkah terakhir untuk legalitas secara hukum dilakukan Pencatatan notaris atau dapat pula Badan Hukum atas biaya swadaya masyarakat. Disemua lokasi yang PNPM Mandiri sudah mulai bekerja, proses pembentukan LKM sebagai pimpinan kolektif adalah seperti paparan diatas.

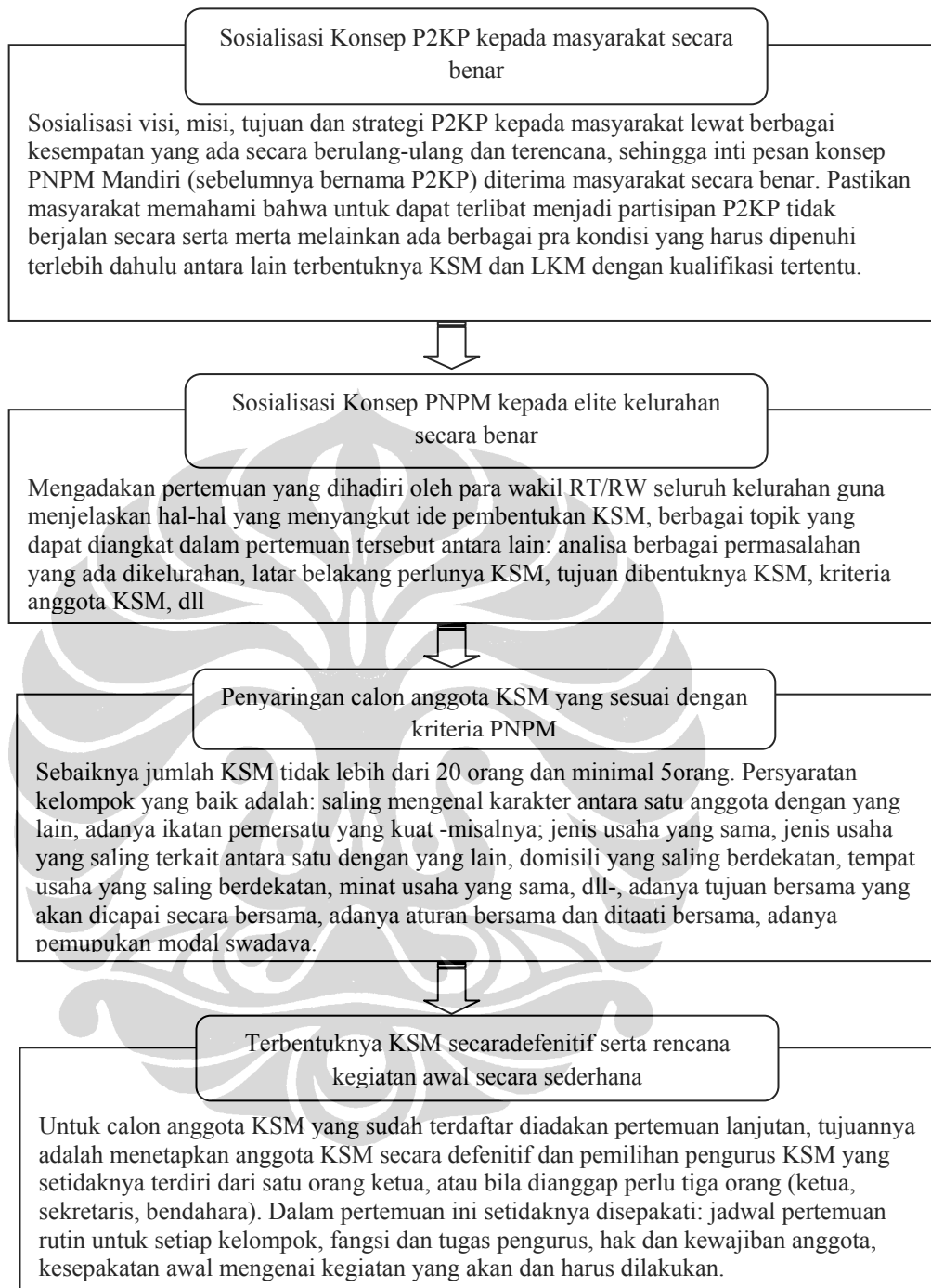
Peran utama LKM adalah:

1. Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM.
2. Sebagai dewan pengambil keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
4. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Mengembangkan jaringan LKM ditingkat kecamatan, kota/ kabupaten sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya
6. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sehari-hari dikelola oleh UPK.

#### **4.2.3.2. Pembentukan KSM**

Sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, proses pembentukan KSM hendaknya benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*) tanpa banyak dipengaruhi motivasi adanya “dana” terlebih dahulu.

Disamping LKM dilokasi yang sudah menjalani PNPM Mandiri juga sudah terbentuk KSM dengan proses pembentukan seperti digambarkan pada diagram alur 2. proses pembentukan KSM.

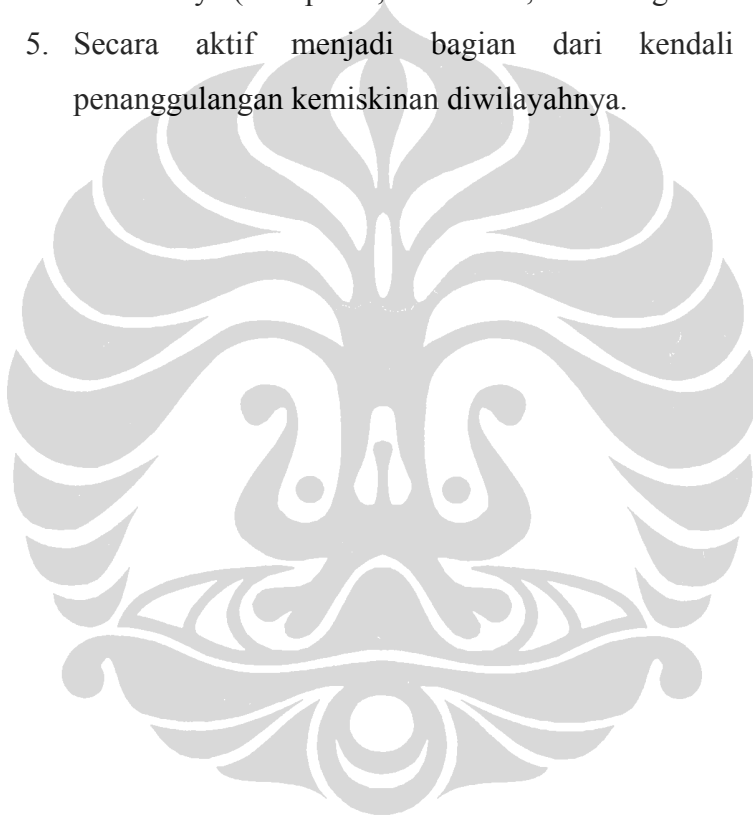


Gambar 4.2. Proses Pembentukan KSM

KSM bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu digalang.

Oleh sebab itu, tugas pokok KSM adalah:

1. Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
2. Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yang diusulkan.
3. Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yang diusulkan.
4. Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang ditekuninya (transparan, demokrasi, membangun dengan mutu, dsb)
5. Secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diwilayahnya.



## BAB V

### TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS

#### 5.1. Gambaran Umum Kedua Kelurahan Sebelum Program PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan kelanjutan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Kelurahan Pancoran Mas dan Kelurahan Ratujoya merupakan kelurahan yang sudah mendapatkan intervensi program P2KP sebelumnya. Di Kelurahan Pancoran Mas P2KP pertama kali masuk tahun 2001 kemudian secara resmi berdiri pada tanggal 18 November 2003 dengan SK Notaris Dwi Priharyanto, SH., SK Menteri Kehakiman dan HAM RI. No. : C-372.HT.03.01-Th.2002 Tgl. 19 Maret 2002. Di Kota Depok, Kelurahan Pancoran Mas diintervensi program P2KP 1-2 bersama-sama dengan 15 kelurahan lain. Berikut ini disajikan tabel lokasi P2KP1-2 yang diintervensi pada tahun 2001:

Tabel 5.1. Lokasi P2KP1-2 Intervensi Tahun 2001 di Kota Depok

No	Kelurahan	LKM
1	Sukamaju baru	Sukamaju Baru
2	Sukatani	Sukatani
3	Jatijajar	Jatijajar
4	Cilangkap	Cilangkap
5	Pondok Jaya	Teguh Karya Jaya
6	<b>Pancoran Mas</b>	<b>Bina Budi Mulya</b>
7	Tugu	Tugu
8	Rangkapan Jaya Baru	Rangkepan Jaya Baru
9	Sawangan Baru	Sawangan
10	Cinangka	Cinangka
11	Kedawung	Kedawung
12	Curug	Curug
13	Curug cimanggis	Curug Cimanggis
14	Pasir Gunung Selatan	Pasir Gunung Selatan
15	Bedahan	Bedahan

*Diolah dari: Koordinator Kota program reguler PNPM Mandiri Perkotaan*

Sedangkan PNPM Mandiri di Kelurahan Ratu Jaya pertama kali diintervensi pada tahun 1999 bersama-sama dengan 31 Kelurahan lain se-Kota Depok. Berikut ini disajikan lokasi P2KP1-1 yang diintervensi pada tahun 1999.

Tabel 5.2. Lokasi P2KP 1-1 Intervensi Tahun 1999

No	Kelurahan	LKM
1	Bhakti Jaya	Bhakti Jaya
2	Mekar Jaya	Mekar Jaya
3	Sukmajaya	Sukmajaya
4	Kalibaru	Kalibaru
5	Sukamaju	Sukamaju
6	Abadi Jaya	Abadi Jaya
7	Cisalak	Cisalak
8	Cilodong	Cilodong
9	Kemiri Muka	Kemiri Muka
10	Tanah Baru	Tanah Baru
11	Beji	Beji
12	Pangkalan Jati Lama	Pangkalan Jati
13	Gandul	Gandul
14	Cinere	Cinere
15	Limo	Limo
16	Sawangan lama	Sawangan Lama
17	Bojong Pondok Terong	Tridaya
18	Cimpaeun	Cimpaeum
19	Cipayung	Cipayung
<b>20</b>	<b>Ratu jaya</b>	<b>Ratujaya</b>
21	Bojong Sari	Bojong Sari
22	Cipayung Jaya	Sumber Amanah
23	Depok jaya	Teguh Karya Jaya
24	Depok	Setia Abadi
25	Mampang	Mampang
26	Cisalak Pasar	Cisalak
27	Rangkepan Jaya	Rangkepan Jaya
28	Mekarsari	Mekarsari
29	Harjamukti	Harjamukti
30	Leuwinanggung	Tunas Harapan Mandiri
31	Tapos	Tunas Harapan

*Diolah dari: Koordinator Kota program reguler PNPM Mandiri Perkotaan*

LKM Ratujaya secara resmi berdiri pada tanggal 23 Maret 2000 dengan SK Notaris Liza Riani, SH. Kemudian mengalami perubahan berdasarkan akta no.4 tanggal 20 September 2000 dihadapan Notaris Liza Riani, SH.

Berdasarkan informasi dari kedua tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun intervensi di Kelurahan Ratujaya lebih awal yakni 1999 dibanding Kelurahan Pancoran Mas tahun 2001. Intervensi tahun 1999 disebut dengan P2KP 1-1 dan intervensi tahun 2001 disebut dengan P2KP 1-2.

Berdasarkan informasi lapangan, intervensi pada tahun 1999 di Kelurahan Ratujaya bersamaan dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai langkah pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan pasca krisis ekonomi. Pada program Jaring Pengaman Sosial masyarakat menganggap bahwa program tersebut merupakan hadiah pemerintah sehingga dana “hutang” JPS banyak yang tidak lancar pengembaliannya. Ketika program P2KP masuk ke kelurahahan, warga memiliki persepsi sama bahwa program P2KP ini adalah hadiah pemerintah seperti program JPS sehingga tidak perlu dikembalikan.

Meskipun sosialisasi awal sudah dilakukan oleh faskel dan LKM akan tetapi persepsi masyarakat tetap tidak berubah. Bahkan lebih jauh seperti program JPS yang membuat mentalitas masyarakat cenderung instan. Jika dalam proses pencairan dana P2KP ini ada kerumitan proses yang dirasakan oleh masyarakat, maka masyarakat membanding-bandingkan dengan program JPS, seperti yang dituturkan oleh salah seorang faskel:

*“Apabila masyarakat merasa ada proses yang rumit dalam pencairan dana, misalnya mereka diminta menyusun program dulu, bikin usaha dulu, kemudian mengajukan proposal, mereka biasanya bilang “di JPS saja tidak serumit ini, disini urusannya rumit sekali” (Dn, 27 Januari 2010).*

Ketika dana sudah turun mentalitas masyarakat tidak berubah, sama halnya dengan program JPS yang macet di Kelurahan Ratujaya, dana bergulir program P2KP



juga macet. Kemacetan yang terjadi pada suatu KSM berpengaruh pada KSM lain, dari satu RT ke RT lain dari mulut ke mulut, seorang LKM menyatakan:

*“macetnya dana bergulir disuatu KSM berpengaruh ke KSM lain, mereka biasanya bercerita antar RT, misalnya saat ada pesta atau acara yang memungkinkan terjadi pertemuan warga lintas RT, saat itu biasanya mereka akan saling bercerita tentang program P2KP bahwa di RT-nya selama ini tidak bayar tidak dikenapa-kenapakan sehingga KSM yang tadinya sudah niat bayar jadi terpengaruh, dan menjadi fenomena yang terus membesar” (El, 27 Januari 2010).*

Pada program P2KP ada ketentuan bahwa LKM yang mendapatkan bantuan dana ekonomi untuk tahun selanjutnya adalah LKM yang pengembalian modal dari KSM (peminjam) diatas 80%. Jika pengembalian dananya di bawah 80% maka pinjaman dana tahun selanjutnya untuk KSM ekonomi akan dihentikan sementara sampai dana bergulir yang dipinjam lunas atau minimal mencapai 80%. Akibat mentalitas KSM ekonomi yang menyamakan P2KP dengan program JPS yang macet dan juga karena beratnya kondisi perekonomian masyarakat menghadapi krisis ekonomi akhirnya membuat pengembalian dana bergulir yang dipinjam tidak mencapai 80% sehingga LKM Ratujaya sejak tahun 2003 tidak lagi mendapatkan dana bergulir untuk KSM ekonomi.

Sedangkan di LKM Pancoran Mas, mulai intervensi dilakukan pada tahun 2001 dengan program P2KP1-2 dan secara resmi terbentuk tahun 2003. Tahun 2003 kondisi perekonomian masyarakat tidak seburuk tahun 1999 dimana perekonomian masyarakat terpuruk akibat krisis. Kondisi ekonomi masyarakat pada tahun 2003 sudah lebih baik jika dibandingkan tahun 1999, sehingga pada tahun 2003 memungkinkan bagi masyarakat untuk bisa memahami lebih baik tentang program P2KP dibandingkan dengan tahun 1999. Disamping itu, program P2KP1-2 yang intervensinya dilakukan pada tahun 2003 ini sudah mengalami penyempurnaan dari program P2KP1-1 yang intervensinya tahun 1999.

Salah satu perbedaan antara P2KP 1-1 dan P2KP 1-2 yang berpengaruh pada kinerja LKM di Kelurahan Ratujaya adalah perbedaan model keorganisasian LKM. Pada P2KP 1-1 model organisasinya adalah berbentuk struktural organisasi yang dipimpin oleh satu orang ketua LKM yang mengambil keputusan dan mengomandoi LKM. Sedangkan pada program P2KP 1-2 model organisasinya adalah kepemimpinan kolektif, dimana keputusan dan komando berdasarkan hasil kesepakatan diantara pimpinan kolektif yang berjumlah 11 orang. Sedangkan peran koordinator LKM pada P2KP 1-2 bukanlah sebagai ketua yang semua keputusan ada ditangannya. Kapasitas koordinator LKM sama dengan pimpinan kolektif LKM yang lain.

Konsep pimpinan kolektif di P2KP 1-2 ketika diterapkan di Kelurahan Pancoran Mas langsung dapat diterapkan karena belum ada program sebelumnya sehingga tidak ada adaptasi terhadap perubahan pola kepemimpinan. Ketika program P2KP1-2 masuk kelurahan Pancoran Mas langsung dibentuk LKM Bina Budi Mulya dengan pola kepemimpinan berbentuk pimpinan kolektif. Pola kepemimpinan LKM Bina Budi Mulya yang berbentuk pimpinan kolektif ini bertahan semenjak program bernama P2KP hingga program berubah nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan saat ini.

Akan tetapi berbeda kondisinya ketika diterapkan di Kelurahan Ratujaya. Di Kelurahan Ratujaya model kepemimpinan LKM pertama kali adalah model kepemimpinan komando yang dipimpin oleh seorang ketua umum LKM. Ketua umum LKM memimpin anggota LKM lain yang jumlahnya 10 orang. Kemudian ketika terjadi perubahan dari P2KP 1-1 menjadi P2KP1-2 dimana pola kepemimpinan berubah dari pola kepemimpinan komando menjadi pola kepemimpinan kolektif realitas pola kepemimpinan di LKM Ratujaya tidak berubah.

Ketika struktur organisasi LKM berubah menjadi kepemimpinan kolektif, LKM tetap menyandarkan komando pada koordinator LKM. Sehingga ketika koordinator jarang datang ke sekretariat LKM, pimpinan kolektif sepuluh orang yang

lain juga jarang datang ke LKM. Ketika kinerja LKM akhirnya lemah, maka pimpinan kolektif LKM sepuluh orang yang lain mengarahkan kepada koordinator LKM sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas lemahnya kinerja LKM tersebut. Pandangan ini diwakili oleh pernyataan seorang pimpinan kolektif:

*“bagaimana mungkin kita maju jika koordinatornya saja tidak pernah ke sekretariat, Senin sampai Sabtu dia ke Bandung, pulang ke Depok Sabtu malam, nanti Senin pagi dia balik lagi, kalau koordinatornya saja begitu bagaimana yang lain bisa terkoordinir, kalau sudah tidak terkoordinir organisasi LKM jadi hancur (Jd, 3 Maret 2010)*

Berbeda halnya dengan kondisi di Kelurahan Pancoran Mas ketika program P2KP 1-2 masuk pada tahun 2003, dimana kondisi perekonomian masyarakat sudah mulai pulih dari krisis hebat tahun 1998. Sedangkan program yang diterapkan juga sudah mengalami penyempurnaan dari program P2KP1-1 menjadi P2KP 1-2. Perpaduan antara program yang sudah mengalami penyempurnaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik, menjadikan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Pancoran Mas lebih baik dibandingkan dengan Kelurahan Ratujaya. Meskipun kemudian di Kelurahan Ratujaya juga dilakukan intervensi program P2KP 1-2, akan tetapi hasilnya tidak bisa sama dengan di Kelurahan Pancoran Mas karena kemacetan pada bantuan pertama seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya membawa dampak untuk bantuan selanjutnya.

Jadi, sebelum Bapenas mengeluarkan kebijakan PNPM Mandiri pada tahun 2007, ketika proyek penanganan kemiskinan di kedua kelurahan masih bernama P2KP kondisi LKM di kedua kelurahan tersebut sudah memiliki kinerja yang berbeda.

## 5.2. Kondisi Empiris PNPM Mandiri Perkotaan Di Kedua Kelurahan

Selanjutnya, agar penelitian ini tetap fokus pada program PNPM Mandiri Perkotaan, penulis memotret kinerja saat ini LKM Pancoran Mas dan LKM Bina Budi Mulya.

Berdasarkan penilaian kinerja LKM yang penulis himpun dari Koordinator Kota (korkot) program PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Depok, tingkat keberhasilan suatu LKM menjalankan program PNPM Mandiri Perkotaan di bedakan menjadi enam kategori, yakni:

1. LKM Tidak Berdaya
2. LKM Cukup Berdaya
3. LKM Berdaya
4. LKM Pra Mandiri
5. LKM Mandiri, dan
6. LKM Madani

LKM tidak berdaya adalah LKM yang kinerjanya paling rendah, LKM cukup berdaya adalah LKM yang kinerjanya lebih baik daripada LKM tidak berdaya, LKM berdaya adalah LKM yang kinerjanya lebih baik daripada LKM cukup berdaya dan begitu seterusnya hingga LKM Madani sebagai LKM dengan kinerja terbaik.

Pada program PNPM Mandiri Perkotaan masing-masing kategorisasi diatas diberikan intervensi yang berbeda. LKM tidak berdaya, LKM cukup berdaya dan LKM berdaya disebut PNPM Tahap pemberdayaan. Sedangkan LKM berdaya, LKM Pra Mandiri, LKM Mandiri disebut tahap kemandirian dan LKM Madani disebut tahap keberlanjutan. Intervensi untuk tahap pemberdayaan adalah penyiapan masyarakat, pembentukan LKM, pembuatan PJM Pronangkis dan pemanfaatan dana BLM. Sedangkan tahap kemandirian dan tahap keberlanjutan disebut dengan PNPM P2KP advanced intervensinya berupa paket, *channeling* program dan *neighborhood development*.

Adapun cara menentukan suatu LKM masuk ke dalam kategori LKM tidak berdaya, LKM cukup berdaya, LKM berdaya, LKM pra mandiri, LKM mandiri atau LKM Madani dinilai berdasarkan beberapa aspek diantaranya: aspek kelembagaan, aspek perencanaan dan implementasi program, aspek pengelolaan keuangan, aspek akuntabilitas dan transparansi, aspek pengorganisasi relawan dan KSM, aspek kemitraan dan *chanelling* (lebih lengkap lihat lampiran 1).

Berikut ini dipaparkan diagram alur proses transformasi LKM dan intervensi yang diberikan:



Diagram 5.1. Alur proses transformasi LKM dan intervensi yang diberikan

Setelah dilakukan penilaian terhadap LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya (Lampiran 1). berdasarkan enam kategorisasi yang sudah di paparkan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa LKM Bina Budi Mulya masuk dalam kategori LKM berdaya sedangkan LKM Ratujaya masuk dalam kategori LKM cukup berdaya.

Oleh karena terdapat perbedaan kategori antara LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya maka intervensi di kedua kelurahan juga berbeda seperti yang sudah disinggung sebelumnya. LKM Bina Budi Mulya termasuk ke dalam kategori LKM berdaya sedangkan LKM Ratujaya masuk ke dalam kategori LKM cukup berdaya.

LKM dengan kategori berdaya selain punya program reguler seperti adanya perputaran dana bergulir, dana untuk pembangunan fisik dan pembangunan sosial juga mendapatkan bonus berupa program Paket dan *Channeling*. Program paket yang sudah didapatkan oleh LKM Bina Budi mulya diantaranya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 7 unit bersama dengan LKM Rangkapan Jaya Baru senilai Rp 45.500.000, alat kesehatan senilai Rp 17.000.000 dan betonisasi jalan sepanjang 360 dengan nilai Rp 33.290.000.

Sedangkan program *channeling* yang pernah dijalin adalah kerja sama dengan Asuransi Jiwa Bumi Putera Syari'ah dalam menjamin simpan pinjam dana bergulir. Peminjam diasuransikan jika ada peminjam yang meninggal selama satu tahun sejak tanggal peminjaman agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain karena pinjamannya diganti oleh asuransi. Namun setelah lewat tanggal pertunggungan tunggakan pinjaman tidak lagi diasuransikan. Premi asuransi tersebut ditanggung oleh masing-masing peminjam sebesar Rp 10.000,-. Akan tetapi pada kenyataannya besarnya premi tersebut tergantung kepada usia peminjam

Pada tahun 2009 ada seorang peminjam yang meninggal dan pinjamannya telah diganti oleh asuransi sebesar Rp 500.000,-.

Berikut ini disajikan tabel progres Paket tahap I yang diberikan ke LKM-LKM dengan kategori *advanced* di Kota Depok.

Tabel 5.3. Progres Paket Tahap I yang diberikan ke LKM dengan kategori *advanced* di Kota Depok untuk **TERMIN 1 (Rp. 337,465,500.00)**.

<b>Nama Pakem</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Jumlah Dana PAKET</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Tugu Sejahtera</b>	Tugu & Jatijajar	RTLH	6 Unit	45,500,000.00	Selesai LPJ
<b>Jarum Mas</b>	<b>Pancoran Mas</b>	Alat kesehatan	1 Unit	17,000,000.00	Selesai LPJ
<b>Karya Sejahtera 1</b>	Cilodong	Alat kesehatan	1 Unit	35,000,000.00	Selesai LPJ
<b>Jati Jaya Mas</b>	<b>Panmas &amp; RJB</b>	RTLH	7 Unit	45,500,000.00	Selesai LPJ
<b>Karya Sejahtera II</b>	Cilodong & Abadi Jaya	RTLH	1 Unit	32,500,000.00	Proses
<b>Teuku Umar</b>	Cinangka	Alat kesehatan	1 Unit	17,000,000.00	Selesai LPJ
<b>Dipenogoro</b>	Cinangka	RTLH	5 Unit	27,000,000.00	Proses
<b>Pelangi Mas</b>	<b>Pancoran Mas</b>	Betonisasi Jalan	360 meter	33,290,000.00	Selesai LPJ
<b>Sejahtera Abadi II</b>	Abadi Jaya	Betonisasi Jalan	611 meter	44,500,000.00	Selesai LPJ
<b>Karya Sejahtera Cilodong</b>	Cilodong	Betonisasi Jalan	402 meter	40,175,500.00	Selesai LPJ

*Sumber: Data Monitoring Koordinator Kota Program Advanced*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa LKM Bina Budi Mulya menjadi salah satu LKM yang mendapatkan bonus berupa program paket bersama LKM lain di Kota Depok diantaranya LKM Tugu, LKM Jatijajar, LKM Cilodong, LKM Rangkapan Jayabaru, LKM Abadi Jaya dan LKM Cinangka.

Sedangkan LKM Ratujaya yang masih masuk ke dalam kategori cukup berdaya tidak mendapatkan bonus paket ataupun *chanelling* karena masuknya LKM Ratujaya ke dalam kategori cukup berdaya berarti masih dalam tahap pemberdayaan sesuai dengan ketentuan P2KP PNPM Mandiri seperti yang sudah dituangkan pada diagram 1 sebelumnya.

Begitu juga untuk program reguler saat ini dimana kedua LKM juga memiliki perbedaan kapasitas. LKM Bina Budi Mulya memiliki program dana bergulir untuk KSM ekonomi, mendapatkan dana stimulan untuk pembangunan fisik dan sosial

sedangkan LKM Ratujaya hanya mendapatkan stimulan untuk pembangunan fisik dan sosial. LKM Ratujaya tidak memiliki program perputaran dana bergulir sejak mengalami kemacetan diawal-awal pogram.

Berikut ini disajikan tabel realisasi program jangka menengah penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pancoran Mas dan Kalurahan Ratujaya tahun 2009.

Tabel 5.4. Realisasi PJM Pronangkis Tahun 2009 LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya

Komponen Program	Sumber Dana	PJM Bina Budi Mulya	PJM Ratu Jaya
Komponen Lingkungan	APBD, APBN, Swasta	561.850.000	350.000.000
	Swadaya	191.848.000	347.220.000
	Sub Total	753.698.000	697.220.000
Komponen Ekonomi	APBD, APBN, Swasta	66.500.000	-
	Swadaya	44.934.000	-
	Sub Total	111.434.000	-
Komponen Sosial	APBD, APBN, Swasta	43.550.000	34.000.000
	Swadaya	8.780.000	11.550.000
	Sub Total	52.330.000	45.550.000
Total		887.462.000	665.627.900

Sumber: Diolah dari PJM Pronangkis LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya

Dari tabel 21 realisasi PJM Pronangkis LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya terlihat bahwa di LKM Bina Budi Mulya tahun 2009 masih terdapat tiga komponen yakni komponen lingkungan sebesar Rp 753.698.000, komponen ekonomi sebesar RP 111.434.000 dan komponen sosial sebesar Rp 887.462.000 sedangkan di LKM Ratujaya hanya terdapat dua komponen yang direalisasikan tahun 2009 yakni komponen lingkungan sebesar Rp 619.977.900 dan komponen sosial sebesar Rp 665.127.900



### 5.3. Realisasi Tujuan Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kedua Kelurahan

Sebagaimana yang dipaparkan dalam PJM Pronangkis dan sudah dijelaskan dikerangka pemikiran terdahulu bahwa kedua kelurahan memiliki tujuan program yang hendak dicapai. Tujuan Program PNPM Mandiri di Kelurahan Pancoran Mas adalah:

1. Menentukan arah dan tujuan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas melalui penyusunan PJM pronangkis tahunan dan 3 tahunan.

Tujuan ini merupakan tujuan yang sangat umum pada suatu LKM. Jika tujuan LKM Bina Budi Mulya adalah penentuan arah penanggulangan kemiskinan dengan terbentuknya PJM Pronangkis, maka tujuan tersebut tentu tujuan yang mudah dicapai. Sebab, sebagai sebuah perencanaan yang dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat setiap LKM pasti memiliki PJM Pronangkis. Akan tetapi jika tujuan umum ini coba untuk dispesifikkan sesuai dengan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam PJM Pronangkis LKM Bina Budi Mulya maka upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai yang mendanai:

a. Komponen Fisik

Komponen ini meliputi perawatan, perbaikan maupun pembangunan baru sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan setempat. Setidaknya komponen fisik Program PNPM Mandiri di Kelurahan Pancoran Mas sudah membangun 1590 meter saluran air dengan total anggaran Rp. 76.560.000,- Melakukan betonisasi jalan sepanjang 8218 meter dengan biaya 515.008.000,- Dan pembangunan RTLH sebanyak 17 unit dengan total biaya Rp 162.130.000,-

b. Komponen Kegiatan Skala Kecil

Kegiatan ekonomi yang dimaksud disini meliputi kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh

perorangan/ keluarga miskin yang menghimpun diri dalam suatu KSM. Penerima bantuan wajib mengembalikan pinjaman usaha ini beserta bunganya (saat ini ditetapkan 1,5% per bulan). Pengembalian dana pinjaman harus dilakukan dalam masa waktu 18 bulan setelah dana mulai diterima. Jumlah penduduk miskin yang masih mendapatkan Dana Bantuan Langsung untuk kegiatan ekonomi skala kecil adalah 475 orang dengan total realisasi anggaran Rp 111.434.000,-

c. Komponen Pelatihan

Kegiatan pelatihan diadakan sesuai kebutuhan dan kesepakatan warga di kelurahan. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial guna mendukung upaya penciptaan peluang usaha yang telah ada yang berarti penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pelatihan yang sudah diadakan adalah pelatihan tata rias, pelatihan las, pelatihan menjahit dan pelatihan peternakan ayam petelor dengan total anggaran Rp 52.330.000,-

Dengan adanya bantuan-bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun semakin melingkupi prasarana dan sarana, dapat memberikan manfaat yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat kelurahan.

2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip dan pendekatan perencanaan partisipatif.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari LKM Bina Budi Mulya, pada saat ini terdapat 105 KSM yang beranggotakan masing-masing KSM rata-rata 5 orang. Sehingga ada sekitar 525 warga yang telah bergabung dengan KSM. Informasi ini menjelaskan bahwa telah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin kelurahan Pancoran Mas meskipun masih sangat kecil dari jumlah seluruhnya yaitu 5.841 orang.

Adanya masyarakat miskin yang bergabung dengan KSM merupakan salah satu indikator bahwa dalam masyarakat telah terdapat niat baik untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama. Hal ini disebabkan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dapat berbaur dengan anggota lain dan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan bersama. Pada umumnya, masyarakat miskin yang bergabung dengan KSM memiliki kesempatan untuk membuka usaha baru dan memperbesar usaha yang sudah ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam KSM, masyarakat yang dikategorikan miskin dan tidak memiliki pekerjaan dapat bergabung dengan kelompok masyarakat lain penerima dana bantuan yang memiliki pekerjaan selama yang bersangkutan dapat menjalankan kewajiban yang telah disepakati bersama, selain itu unsur kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat cukup berpengaruh terhadap penerimaan seseorang dalam KSM.

Untuk menghindari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tanggapan negatif dari masyarakat, LKM Bina Budi Mulya memberikan laporan bulanan kepada forum musyawarah dan hasilnya ditempel pada fasilitas umum. Cara ini dinilai efektif karena lebih transparan dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses perguliran dana dilakukan. Sedangkan dalam pemberian dana kepada KSM, setiap KSM yang akan menerima dana diwajibkan menyertakan minimal seorang anggota KSM tersebut sebagai saksi penyerahan dana. Selain itu, proses penyerahan dana tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto yang kemudian ditempelkan di depan kantor LKM Bina Budi Mulya.

Selain itu dampak positif lain yang dirasakan di Kelurahan Pancoran Mas, diantaranya:

- a. Pelaksanaan program secara langsung memupuk swadaya masyarakat yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Secara tidak langsung memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.

- b. Menimbulkan dampak positif terhadap partisipasi dan semangat solidaritas masyarakat desa yang ditunjukkan dengan kerjasama yang semakin erat antara masyarakat dengan pemerintah dan antara anggota masyarakat itu sendiri. Jumlah masyarakat yang ikut dalam gotong royong sebagai bentuk partisipasi langsung cukup besar setiap ada kegiatan.
3. Teridentifikasinya jenis-jenis usulan dan rencana kegiatan berdasarkan pada kekuatan dan potensi yang ada serta kebutuhan riil masyarakat.

Dalam implementasi program dilapangan, selain dana bantuan langsung juga ada dana yang berasal swadaya masyarakat, besarnya dana yang berasal dari swadaya masyarakat adalah minimal 30% dari total proyek. Adapun realisasi dana swadaya sampai tahun 2009 di LKM Bina Budi Mulya adalah sebesar Rp 245.562.000,- dari total proyek Rp 887.462.000,-. Artinya potensi dan kekuatan masyarakat sudah terlihat dengan adanya program swadaya dari masyarakat ini. Hanya saja jika pengertian potensi dan kekuatan yang ada ditengah masyarakat ini sedikit diperluas bukan saja bermakna swadaya tetapi misalnya kemampuan mandiri untuk mengembangkan perekonomian secara mandiri maka kekuatan dan potensi semacam ini belum ditemukan. Apalagi jika kekuatan dan potensi masyarakat lokal ini diperluas bukan saja bermakna ekonomi tetapi bermakna kesehatan, keamanan, politik dan sosial maka potensi dan kekuatan untuk keluar dari kemiskinan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat belum ditemukan.

Oleh karena dimensi kemiskinan yang demikian kompleks dan rumit mencakup bukan saja dimensi ekonomi akan tetapi meliputi dimensi kesehatan, politik, keamanan dan sosial maka penulis sarankan agar pemberdayaan bukan saja disatu aspek ekonomi masyarakat miskin. Tetapi perlu pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan seperti menimbulkan rasa kepedulian sosial orang-orang mampu, tenaga kesehatan, aktifis-aktifis LSM

untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Sehingga persoalan kemiskinan bukan saja persoalan orang miskin saja tetapi menjadi persoalan bersama.

4. Teridentifikasinya rencana program masyarakat, swadaya dan insentif Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), departemen-departemen pemerintah, *channeling* perbankan, swasta dan kelompok peduli.

Tujuan ini belum sepenuhnya dapat dicapai. Sebab, realisasi BLM yang ada di LKM Bina Budi Mulya masih berkutat seputar APBN dan APBD. Sedangkan kemampuan untuk mengakses dana dari departemen-departemen, *channeling* perbankan, swasta dan kelompok peduli belum dapat dilaksanakan. Disamping karena SDM yang terbatas untuk merealisasikan tujuan ini, kegiatan selama ini tidak difokuskan untuk meraih dana-dana yang berasal dari *channeling* perbankan, swasta ataupun kelompok peduli. Akan tetapi sejauh ini masih difokuskan untuk meraih program paket.

Penulis sarankan, untuk keberlanjutan program maka dibutuhkan keseriusan menindaklanjuti tujuan *channeling* perbankan, swasta dan kelompok peduli ini. Sebab, program PNPM Mandiri akan berakhir sampai tahun 2015, artinya setelah itu tidak ada lagi bantuan BLM program PNPM Mandiri. Harapannya setelah program berakhir, Lembaga paguyuban masyarakat dalam bentuk LKM tidak bubar, tetapi terus melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembentukan *channeling* perbankan, swasta dan kelompok peduli menjadi sangat penting. Bukan saja sebatas untuk mengakses dana tetapi juga untuk merawat kesadaran bersama dalam rangka pemberantasan kemiskinan secara bersama.

Adapun Tujuan PNPM Mandiri Kelurahan Ratujaya, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pendidikan sebesar 100% di tahun 2010.

Dari informasi berdasarkan profil kelurahan Ratujaya tentang pendidikan dapat diketahui bahwa pendidikan SLTA dan sederajat merupakan jumlah terbesar yakni sebesar 8.312 jiwa, sedangkan urutan kedua adalah tamatan Sekolah Dasar dengan jumlah 3.952 jiwa, kemudian berturut-turut adalah lulusan SD/ MI sebesar 2.153 jiwa, sarjana strata I sebanyak 755 jiwa, D1/ D2/ D3/ D4 sebanyak 236 jiwa dan sarjana strata II sebanyak 52 jiwa (Profil Kelurahan Ratujaya, 2009). Angka tidak melek hurufnya mencapai 3.938 orang. Tingginya angka tidak melek huruf ini merupakan suatu indikasi bahwa kesadaran masyarakat Ratujaya akan pentingnya pendidikan masih rendah. Sehingga tujuan program PNPM Mandiri Kelurahan Ratujaya untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pendidikan dengan bilangan sempurna yakni 100% seperti sulit direalisasikan. Apalagi jika melihat kondisi internal LKM sendiri yang kurang solid.

2. Menurunkan anak putus sekolah sebesar 50% ditahun 2010.

Dari Angka tidak melek huruf di Kelurahan Ratujaya yang mencapai 3.938 orang, sebanyak 387 adalah putus sekolah. Artinya hampir mencapai 10% dari total yang tidak melek huruf mengalami putus sekolah. Selama tahun 2009 saja angka putus sekolah mencapai 80 orang (PJM Pronangkis, 2009). Alasan para siswa putus sekolah bermacam-macam, seperti tidak ada biaya, lebih baik kerja mencari uang dari pada sekolah menghabiskan uang ada juga yang beralasan karena ingin membantu orang tua. Tetapi alasan yang paling dominan adalah tidak ada biaya sekolah.

Artinya jika LKM bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah maka LKM dituntut membantu dana sekolah untuk anak-anak. Walaupun bentuknya tidak harus berbentuk dana langsung, bisa misalnya dengan mencarikan akses beasiswa atau dengan mencarikan orang-orang mampu sebagai orang tua angkat. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah kondisi LKM yang lemah sehingga menurut hemat penulis tujuan untuk menurunkan anak putus sekolah sebesar 50% pada tahun 2010 sulit direalisasikan. Sehingga upaya yang mesti

dilakukan adalah membenahan kondisi internal LKM, misalnya dengan memilih pengurus baru dan koordinator LKM yang baru. Dengan begitu diharapkan akan muncul tenaga-tenaga baru dan ide-ide baru untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Meningkatkan pemahaman warga akan pentingnya hidup sehat, kesadaran kesehatan lingkungan sebesar 50% pada tahun 2010.

Pola hidup sehat merupakan salah satu yang harus diperhatikan untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Sebab tanpa kesehatan seseorang tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Oleh karena itu, salah satu fokus pembangunan berbasis masyarakat adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan.

Jika mencermati kemiskinan di Kelurahan Ratujaya yang sebagian besarnya adalah kemiskinan kultural. Maka upaya untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya kesehatan sulit dilakukan. Sebab, untuk melakukan pola hidup sehat membutuhkan asupan gizi yang cukup dan teratur. Disamping itu, kinerja LKM Ratujaya yang belum pernah mengadakan pembelajaran ataupun pelatihan tentang hidup sehat maka upaya untuk merealisasikan tujuan meningkatkan pemahaman warga akan pentingnya hidup sehat, kesadaran kesehatan lingkungan sebesar 50% pada tahun 2010 sulit dilakukan.

Penulis punya saran, untuk meningkatkan pemahaman kesehatan perlu dilakukan pembelajaran dan pembiasaan serta sarana yang mendukung pola hidup sehat perlu disediakan. Seperti menyediakan pembuangan sampah dalam jumlah yang memadai. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai yang melintasi kelurahan harus dirubah dan dihentikan. Tentunya dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk memahamkan masyarakat tentang pola hidup sehat. Sehingga pembelajaran tidak hanya berhenti pada tahap transfer pengetahuan tetapi ada realisasi yang berkesinambungan.

4. Meningkatkan pemahaman warga tentang kesehatan ibu hamil dan merawat kesehatan balita sebesar 100% pada tahun 2010

Upaya untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang kesehatan ibu hamil dan merawat kesehatan balita dikelurahan Ratujuaya sering dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia Jurusan Kebidanan untuk kepentingan tugas perkuliahan yang bekerja sama dengan kader posyandu kelurahan. Upaya ini tentu saja ada manfaatnya bagi warga kelurahan karena walaupun sedikit mereka mendapat manfaat secara langsung dengan praktek mahasiswa tersebut seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan merawat kesehatan balita. Kader posyandu juga merasakan manfaatnya dengan praktek yakni penambahan pengetahuan. Akan tetapi kegiatan praktek tersebut bersifat musiman, tidak berkelanjutan. Aktifitas yang sifatnya musiman tentu tidak akan banyak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perbaikan pemahaman warga tentang kesehatan ibu hamil dan merawat kesehatan balita. Dan selama ini kegiatan memberi pemahaman tentang kesehatan ibu hamil dan merawat kesehatan balita belum pernah dilakukan oleh LKM. Sehingga tujuan meningkatkan pemahaman warga tentang kesehatan ibu hamil dan merawat kesehatan sebesar 100% pada tahun 2010 tentu sulit dilakukan.

5. Meningkatkan kepedulian sosial kepada warga miskin.

Upaya untuk meningkatkan kepedulian sosial warga miskin membutuhkan sinergi yang dinamis antara komponen-komponen yang terlibat dalam program. Mulai dari pimpinan kolektif LKM, KSM, masyarakat yang mampu dan masyarakat miskin itu sendiri. Kasus di LKM Ratujuaya dengan kondisi pimpinan kolektif yang jarang aktif membuat upaya meningkatkan kepedulian sosial kepada warga miskin sulit dilakukan. Bagaimanapun, LKM merupakan jantung program PNPM Mandiri di suatu kelurahan. Sehingga jika pimpinan kolektif LKM tidak bergerak maka upaya membangkitkan kepedulian sosial kepada masyarakat miskin tentu sulit dilakukan. Hal ini terlihat ketika



pengerjaan proyek pembangunan jalan setapak. Dalam setiap proyek maka sudah lazim ada sumbangan masyarakat sekitar 30% berupa tenaga atau sumbangan konsumsi untuk pekerja. Akan tetapi hal ini belum terjadi di Kelurahan Ratujaya. Masyarakat masih sulit diminta kepedulian sosialnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan alasan bahwa untuk pembangunan proyek PNPM Mandiri dananya sudah ada dari pemerintah. Seperti yang dituturkan salah seorang pimpinan kolektif LKM Ratujaya:

*"Masyarakat senantiasa kita ajak untuk menyumbang, seperti untuk membuat teh atau kopi buat pekerja, syukur-syukur ada makan beratnya tapi tidak seberapa yang mau menyumbang. Masyarakat itu taunya duit pemerintah, kesadaran mereka masih sangat lemah"* (Sk, 4 Maret 2010).

Jadi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat meski sudah dilakukan tapi masih minim. Kesadaran yang muncul ditengah masyarakat untuk kepentingan umum saja seperti yang diucapkan salah satu responden diatas masih perlu diperbaiki. Apalagi kesadaran untuk peduli kepada kondisi individu miskin dan memperbaiki kondisi individu tersebut.

Penulis berpendapat bahwa penanganan masalah kemiskinan harus menyentuh level individu bukan hanya secara umum. Untuk mengatasi kemiskinan individu secara pragmatis bisa dilakukan dengan melibatkan orang-orang mampu dan menimbulkan kesadaran kepada mereka tentang arti penting penanganan kemiskinan. Menciptakan kesadaran ditengah orang miskin untuk secara mandiri keluar dari kemiskinan itu penting akan tetapi upaya melibatkan orang-orang mampu untuk secara bersama-sama mengatasi persoalan kemiskinan juga penting dilakukan. Sehingga ditengah-tengah masyarakat timbul kontrol bersama atas persoalan kemiskinan. Oleh karena itu menurut hemat penulis pemberdayaan terhadap orang-orang kaya juga penting dilakukan.

#### 5.4. Karakteristik LKM

LKM bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat. Secara singkat LKM dapat dikatakan sebagai lembaga pimpinan kolektif dari suatu organisasi masyarakat yang berbentuk paguyuban atau himpunan, yang memiliki fungsi utama sebagai dewan pengambil keputusan yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan secara partisipatif.

Sebagai lembaga pimpinan, LKM juga menjadi sumber inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama khususnya dikaitkan dengan kemiskinan dengan tetap menghargai hak pihak lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya terhadap berbagai dominasi pengaruh.

Oleh karena peran pimpinan LKM yang sangat penting dalam program P2KP, maka pengkajian tentang profil para pimpinan kolektif menjadi penting. Kajian profil pimpinan ini dirujuk dari berbagai sumber diantaranya adalah dari akta Notaris LKM serta data hasil wawancara baik dengan yang bersangkutan maupun dengan yang lain selain yang bersangkutan. Selain profil pimpinan kolektif, untuk kelengkapan informasi penelitian penulis juga secara khusus melakukan kajian terhadap koordinator LKM.

a. Profil pimpinan kolektif LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya:

Pimpinan kolektif LKM Bina Budi Mulya rata-rata berpendidikan SLTA. Koordinator LKM adalah lulusan diploma berusia 70 tahun merupakan pensiunan *Library of Congress* (Perpustakaan Dubes AS). Ditengah masyarakat Kelurahan Pancoran Mas, aktif sebagai tokoh masyarakat yang disegani. Sumberdaya Manusia yang mengelola LKM rata-rata usia pensiun. Sehingga dapat dikatakan, sumberdaya manusia yang mengelola LKM Bina Budi Mulya cukup memadai dilihat dari

pengalaman kerja dan skill yang tinggi. Usia pensiun ini juga membuat pengurus LKM bisa fokus mengelola LKM karena tidak terikat dengan pekerjaan lain. Serta tidak memiliki beban ekonomi keluarga yang berat karena anak-anak mereka yang sudah besar-besar dan bahkan mendorong orang tuanya untuk aktif dikegiatan sosial kemasyarakatan untuk menghindari kejenuhan dirumah.

Masing-masing bidang dikelola oleh tenaga-tenaga yang punya keahlian dibidang yang bersangkutan. Seperti pengelolaan keuangan, ditangani oleh pensiunan BPKP dengan pangkat terakhir eselon III. Sehingga pembukuan laporan keuangan dapat ditangani dengan rapi. Dan dijadikan contoh oleh LKM lain yang melakukan studi banding ke LKM Bina Budi Mulya, seperti LKM dari Kendari. *Debt* kolektor (tukang tagih hutang) adalah pensiunan TNI angkatan darat dan tokoh yang disegani serta ketua salah satu RT di Kelurahan Pancoran Mas. Dengan posisi yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat yang disegani memudahkan untuk masuk ke masyarakat serta mengingatkan tentang pentingnya membayar hutang ke LKM Bina Budi Mulya. Begitu juga dengan Pelaksana Lapangan adalah kontraktor yang faham dengan suatu proyek pembangunan seperti pembangunan rumah atau pembangunan jalan. Disamping punya skill yang tinggi dan ditempatkan sesuai dengan bidangnya pimpinan kolektif LKM Bina Budi Mulya juga memiliki mentalitas keagamaan yang kuat serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini tercermin dari tindakan koordinator LKM yang bersedia menyewakan rumahnya untuk kantor LKM dengan sewa yang murah Rp 300.000,- per bulan termasuk biaya listrik dan *office boy*.

Dari segi pendidikan tidak banyak perbedaan antara LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya. Begitu juga tidak ada perbedaan antara LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya dalam hal penempatan orang-orang yang sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan. Hanya saja jika pimpinan kolektif LKM Bina Budi Mulya adalah para pensiunan maka LKM Ratujaya adalah tenaga-tenaga yang masih produktif kerja. Usianya berkisar antara 30-50 tahun. Usia pimpinan kolektif yang masih muda-muda serta memiliki beban tanggungan keluarga yang relatif berat karena anaknya masih butuh biaya hidup dari orang tua. Kondisi ini kemudian

membuat keaktifan pengurus LKM Ratujaya lebih rendah dibanding dengan LKM Bina Budi Mulya. Profil rinci pengurus LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya disajikan pada lampiran 2.

Berdasarkan paparan profil pimpinan kolektif kedua LKM diatas setidaknya penulis menangkap dua hal yang menjadi faktor pembeda antara pimpinan kolektif LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya, yakni:

#### 1. Usia pimpinan kolektif

Rata-rata usia pimpinan kolektif LKM Bina Budi Mulya adalah usia pensiun, bahkan sebagian besar pimpinan kolektif berusia diatas 55 tahun. Secara ekonomi mereka relative “aman” karena disamping mendapat tunjangan pensiunan juga ada anak-anak mereka yang sudah bekerja dan menunjang perekonomian mereka. Sehingga waktu mereka sehari-hari banyak kosong dari aktivitas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Akhirnya ke aktifan di LKM justru menjadi suatu kebutuhan, minimal kebutuhan untuk mengisi kekosongan waktu, seperti yang di nyatakan salah seorang pimpinan kolektif ketika ditanya motivasi mereka bersedia aktif di LKM:

*“Saya ini penting aktif di LKM buat ngisi kekosongan waktu, seusia saya kalau banyak duduk dan diam dirumah sangat menjenuhkan, penyakit mudah datang dan cepat pikun” (Hj, 15 Februari 2010)*

Kondisi di LKM Bina Budi Mulya tersebut berbeda dengan kondisi di LKM Ratujaya yang pimpinan kolektifnya rata-rata berusia produktif untuk kerja. Kisaran usia yang dominan adalah 30-50 tahun. Disamping berhadapan dengan tantangan dan tugas-tugas pekerjaan yang cukup menyita waktu, mereka juga memikul beban nafkah keluarga untuk anak-anak yang masih kecil. Ketika dihadapkan pada pilihan mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak yang sedang membutuhkan atau bekerja secara swadaya untuk masyarakat, tentu pilihan yang logis jika sebagian besar pimpinan kolektif memilih bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak

yang sedang membutuhkan. Hal tersebut adalah pilihan ekonomi yang biasa terjadi. Akan tetapi jika sebagian besar pimpinan kolektif adalah mereka yang berusia produktif sedangkan pekerjaan sebagai pimpinan kolektif secara swadaya maka akibat logisnya adalah pekerjaan sebagai pimpinan kolektif di LKM akan menjadi nomor dua. Akibat selanjutnya adalah kinerja LKM akan melemah seperti yang sudah terjadi di LKM Ratujaya. Bahkan untuk tugas yang mesti dilakukan oleh pimpinan kolektif seperti menghadiri rapat musrembang ditingkat kecamatan pimpinan kolektif menyerahkan tugas tersebut kepada UPL, seperti yang dinyatakan oleh UPL:

*“saking tidak ada orangnya, rapat semacam Musrembang tingkat kecamatan yang mestinya dihadiri oleh pimpinan kolektif LKM tetapi tidak ada satupun yang datang, yang datang sebagai perwakilan LKM Ratujaya malah saya -UPL- yang tidak punya wewenang untuk urusan keluar” (Ap, 3 Maret 2010).*

Sedangkan pengakuan yang disampaikan oleh salah seorang pimpinan kolektif LKM adalah:

*“banyak teman-teman pimpinan kolektif LKM kalau diundang rapat tidak datang karena mereka dituntut bekerja dan berbuat akan tetapi apa yang mereka dapatkan tidak ada, jangankan untuk insentive untuk ganti pulsa atau ganti bensin pun tidak ada. Harusnya pemerintah itu membangun sepenuhnya, dengan program ini seperti pemerintah ingin melepaskan tanggungjawab sebagai pengurus rakyat”.* (Sn, 27 Februari 2010)

## 2. Motivasi dan Kesempatan

Meskipun latar belakang pimpinan kolektif di LKM Pancoran Mas dan LKM Ratujaya berbeda –beda akan tetapi jika ditanya tentang kesediaannya aktif terlibat sebagai pimpinan kolektif rata-rata jawabannya sama yakni ingin memberikan sumbangsih berupa tenaga dan fikiran untuk pembangunan lingkungan (lampiran 2). Namun demikian, meskipun motivasi pimpinan kolektif di LKM Pancoran Mas sama dengan motivasi pimpinan kolektif LKM Ratujaya akan tetapi yang membedakan adalah kesempatan untuk merealisasikan maksud atau motivasi tersebut. Pimpinan

kolektif LKM Bina Budi Mulya dapat mewujudkan motivasi tersebut karena adanya kesempatan waktu yang leluasa. Dengan adanya motivasi yang sama antar sesama pimpinan kolektif untuk membangun wilayah dan adanya kesempatan untuk merealisasikan hal tersebut maka modal sosial diantara pimpinan kolektif LKM Bina Budi Mulya semakin hari akan semakin menguat sehingga kekompakan dan kesatuan dapat terus terjalin. Berbeda halnya dengan pimpinan kolektif LKM Ratujaya, meskipun juga punya motivasi memajukan dan membangun kelurahan namun jika kesempatan untuk itu tidak ada karena ketidakleluasaan waktu maka hasil akhirnya tidak akan sama dengan LKM Pancoran Mas. Seperti yang diungkapkan oleh seorang sekretaris LKM Ratujaya:

*“bagaimana mungkin masyarakat bisa maju, perguliran dana berjalan dengan baik jika datang ke sekretariat saja malas, padahal untuk memajukan masyarakat butuh ide-ide, dan ide-ide itu muncul apabila kita bersama-sama sering ngumpul” (El, 25 Feberuari).*

b. Koordinator LKM

Seperti yang sudah penulis singgung sebelumnya untuk kelengkapan informasi penelitian penulis juga secara khusus melakukan kajian terhadap koordinator LKM.

Meskipun kinerja berhasil atau tidaknya PNPM Mandiri disuatu kelurahan dipengaruhi oleh kinerja pimpinan kolektif LKM akan tetapi untuk mempertajam analisa terhadap perbedaan kinerja antara suatu LKM dengan LKM lain perlu kiranya memotret tentang koordinator LKM.

Koordinator LKM Bina Budi Mulya adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh serta memiliki mentalitas keagamaan yang sangat kuat dan memiliki jiwa sosial yang tinggi yang dibuktikan dengan kesediannya menjadikan rumah pribadi sebagai sekretariat LKM Bina Budi Mulya, dengan sewa Rp 300.000/ bulan termasuk biaya listrik dan *office boy*. Disamping itu kordinator LKM Bina Budi Mulya juga punya pengalaman sebagai Birokrat di *Library of congress* (Perpustakaan Kadubes Amerika). Posisinya sebagai tokoh masyarakat yang sangat

disegani, latar belakang sebagai Birokrat, jiwa sosial yang tinggi serta didukung oleh mentalitas keagamaan yang kuat ini membuatnya mampu menjadi magnet dan perekat diantara sesama pimpinan kolektif LKM. Sekretariat LKM benar-benar berfungsi sebagai kantor yang aktif setiap hari mulai hari Senin hingga Sabtu. Sehingga peran LKM sebagai pengambil kebijakan atau keputusan, penjaga moral dan pengawas atas pengelola yang dilaksanakan oleh unit-unit pengelola dapat dilakukan dengan baik.

Hal itu berbeda dengan pimpinan kolektif LKM Ratujaya. Koordinator LKM adalah seorang politisi sebuah partai politik serta pengusaha kontraktor. Koordinator LKM lebih memerankan diri sebagai seorang politisi dan pengusaha. Sikap sebagai politisi yang nampak dari pimpinan kolektif ini adalah sebagaimana yang diutarakan oleh informan:

*“sehari-hari dia tu-koordinator LKM- jarang datang, kalau ada apa-apa biasanya nyuruh yang lain, tapi kalau lagi musim pemilu dia tu amat rajin datang ngumpul orang-orang dah, gimana LKM mau maju kalau LKM dia jadikan kendaraan politik, kalau ada maunya rajin kalau ga ada ya begitu dah”. (Sk, 4 Maret 2010)*

Seorang informan lain menyatakan:

*“dia tu sibuk dengan usahanya di Bandung, ke Depoknya cuma malam minggu tapi senin pagi sudah balik lagi, kalau diingetin tentang LKM dia biasanya bilang “tenang saya ini ngurus yang diatas biar usulan-usulan kita cepat cair”, urusan diatas apa yang dia urus, dari dulu sampai sekarang ga ada kemajuan apa-apa yang ada malah mundur, wong LKM itu mestinya ada ditengah masyarakat bersama-sama masyarakat memberdayakan mereka, urusan atas itu bukan urusannya LKM”. (Jd, 4 Maret 2010)*

### 5.5. Implementasi Program PNPM Mandiri di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya

Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sangat menekankan prinsip-prinsip diantaranya: bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokrasi, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlangsungan dan sederhana.

Untuk mengkaji implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan, penulis mengkaji seperti apa penerapan hal-hal yang menjadi prinsip tersebut. Berikut ini disajikan Tabel 5.5. analisis Implementasi prinsip-prinsip dasar LKM Pancoran Mas dan LKM Ratujaya:

Tabel 5.5. Analisis Implementasi prinsip-prinsip PNPM Mandiri di LKM Pancoran Mas dan LKM Ratujaya

No	Prinsip-prinsip PNPM Mandiri	LKM Bina Budi Mulya	LKM Ratujaya
1.	Bertumpu pada pembangunan manusia.	Pembangunan manusia bukanlah yang menjadi tumpuan utama di LKM Bina Budi Mulya, pembangunan manusia hanya menjadi dampak ikutan setelah pembangunan ekonomi dilakukan, yaitu dengan menumbuhkan disiplin membayar dana bergulir dengan jujur.	Pendekatan ini belum berjalan di LKM Ratujaya karena pertimbangan yang dilakukan fasilitator dan yang diinterpretasikan oleh warga dalam setiap pertemuannya masih bertumpu pada pemberdayaan sosial dan lingkungan.
2.	Otonomi.	Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. Konsep pengembangan ini mengacu pada wacana otonomi daerah, dimana daerah diberi	Implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Ratujaya dalam menjalankan fungsinya belum tampak berupaya untuk mengembangkan sumberdaya lokal. Perhatian para pengurus dan fasilitator masih bertumpu pada dana



(Sambungan tabel 5.5...)

		<p>kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, disamping itu, ditingkat lokal masyarakat juga perlu menyikapi dan memahami arti pengembangan sumberdaya lokal di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.</p> <p>Dalam pelaksanaan program, LKM Bina Budi Mulya belum memiliki otonomi yang cukup memadai kecuali sebatas pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sedangkan sampai memiliki kemampuan mengelola potensi lingkungan yang ada dibutuhkan pendampingan lebih jauh, misalnya bagaimana memanfaatkan lokasi kelurahan yang berdekatan dengan stasiun Depok untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.</p>	<p>bantuan PNPM Mandiri tanpa melihat aspek-aspek lain seperti pengembangan sumberdaya yang dimiliki oleh warga di wilayah tersebut.</p> <p>Kondisi ini diperparah setelah LKM Ratujaya tidak lagi mendapatkan dana bergulir setelah dana bergulir mengalami kemacetan, praktis pengembangan sumberdaya lokal tidak pernah terjadi. Sehingga ekonomi masyarakat miskin tidak tersentuh secara langsung. Pemberdayaan lokal hanya terjadi pada KSM lingkungan dan fisik, misalnya ketika ada program pembangunan jalan atau selokan.</p>
3.	Desentralisasi.	<p>Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.</p> <p>Pengurus LKM Bina Budi Mulya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah lama menjadi pengurus berbagai organisasi di Kelurahan tersebut yang memiliki kapasitas sebagai pimpinan kolektif LKM serta para pengurus tersebut adalah orang-orang yang dapat dipercaya, itu adalah suatu hal</p>	<p>Pendekatan desentralisasi ini masih terlalu muluk untuk diimplementasikan ditingkat lokal. Dengan tingkat ketergantungan dan ketidakberdayaan masyarakat selama ini, intervensi dalam bentuk pendampingan masih mutlak diperlukan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam penyebaran informasi pun, para tokoh masyarakat masih perlu didampingi oleh</p>

(Sambungan tabel 5.5...)

		<p>yang menguntungkan bagi warga Kelurahan. Seperti yang dikatakan oleh seorang informan:</p> <p><i>“para pengurus LKM itu adalah orang-orang tua kita yang dipercaya di lingkungan RW dan mereka orang yang terbuka dengan setiap aspirasi yang disampaikan warga”</i> (Sg, 27 Februari 2010).</p> <p>Namun, dengan pendekatan desentralisasi, anggota masyarakat lain tentu juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam program ini. Sebab, merupakan suatu indikasi yang kurang sehat untuk menciptakan masyarakat yang mandiri jika ditengah masyarakat yang punya kemampuan mengelola LKM orangnya tidak berganti. Seperti yang dinyatakan seorang pengurus LKM yang juga ketua RT:</p> <p><i>“saya diminta jadi pimpinan kolektif LKM oleh warga RT, setelah jadi LKM mustinya saya tidak jadi RT, tapi mereka katakan ini untuk kebaikan lingkungan akhirnya mereka nyuruh saya lagi jadi RT, saya kasihan dan akhirnya saya juga jadi RT”</i> (Sn, 8 Februari 2010).</p> <p>Dengan demikian, pendekatan desentralisasi belum</p>	<p>fasilitator agar informasi dapat disampaikan secara tepat dan benar. Dalam Implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Ratujuaya, pendekatan desentralisasi ini belum dilaksanakan secara memuaskan. Memang pembentukan LKM dan pemilihan pengurusnya dilakukan secara terbuka. Namun yang perlu dicatat bahwa yang diundang menghadiri pertemuan tersebut adalah orang-orang lama yang ditunjuk lantaran hubungan kekerabatan bukan karena kapasitas. Seorang informan mengatakan:</p> <p><i>“Yang dimunculkan di LKM bukan orang-orang baru tetapi orang-orang lama yang sudah diketahui aktif di kelurahan semisal di LPM, tapi kerjanya dulu ga jelas, sekarang setelah di LKMpun sama saja, untuk hadir rapat saja susahny minat ampun”</i> (Ap, 11 Maret 2010).</p>
--	--	--	---

(Sambungan tabel 5.5...)

		diterapkan sepenuhnya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Pancoran Mas.	
4.	Berorientasi pada masyarakat miskin.	<p>Prinsip ini dijalankan dalam Implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Pancoran Mas. Warga yang berpartisipasi adalah masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Pendataan masyarakat dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat sendiri yang kenal betul tentang warganya. Hal ini berlaku untuk KSM ekonomi sedangkan KSM fisik dan lingkungan dilakukan berdasarkan prioritas yang banyak memberikan manfaat yang diketahui dari survey yang dilakukan sebelumnya. Seperti yang dinyatakan oleh UPT LKM Bina Budi Mulya:</p> <p><i>“sebelum LKM memutuskan akan memberi bantuan dana, maka kami selaku UPT terlebih dahulu melakukan survey kondisi yang paling layak untuk dibantu, semua orang miskin itu layak dibantu maka kami cari yang paling layak dan mendesak untuk dibantu” (Sar, 3 Februari 2010)</i></p>	<p>Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.</p> <p>Prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan oleh LKM Ratujaya, sebab setiap bantuan yang diberikan masih berdasarkan pertimbangan kedekatan kekerabatan dengan KSM yakni fisik dan lingkungan (sebagaimana yang sudah dipaparkan bahwa di LKM ratujaya sudah tidak ada lagi KSM ekonomi). Seperti yang dinyatakan oleh seorang informan:</p> <p><i>“Di ratujaya yang sering dapat proyek adalah RW 4 dan RW 8 karena adanya pertimbangan kedekatan kekerabatan tidak pakai survey ketika menurunkan suatu proyek, walaupun ada rekomendasi hasil survey, seringkali tidak dipakai. (AT, 11 Maret 2010).</i></p>
5.	Partisipasi.	Pada imlementasi program PNPM Mandiri di Kelurahan Pancoran Mas, pendekatan partisipatif cukup berhasil dilaksanakan. Masyarakat sudah dilibatkan sejak proses	Prinsip partisipasi menjadi sangat rumit dilakukan di LKM Ratujaya sebab sejak dana bergulir sudah tidak ada dan LKM

(Sambungan tabel 5.5...)

		<p>perencanaan, dimana masyarakat sendiri yang memilih pengurus LKM dengan mekanisme voting. Pada tahap selanjutnya, keterlibatan masyarakat juga terasa. Kader masyarakat turut serta dalam pemetaan swadaya yang dilakukan oleh LKM untuk menentukan warga mana yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan dana bantuan ekonomi yang ada.</p>	<p>sudah jarang rapat bahkan selama penulis mengadakan penelitian selama hampir 3 bulan dari Januari hingga Maret belum pernah diadakan rapat LKM satu kalipun. Jadi praktis partisipasi menjadi nilai yang jauh dari kenyataan. Meskipun diawal-awal program partisipasi cukup tinggi namun, seiring berjalannya waktu dan dana yang diharapkan oleh masyarakat untuk infrastruktur lama sekali cairnya maka partisipasi masyarakat dalam setiap pertemuan semakin berkurang.</p> <p><i>“Di LKM itu menjenuhkan: karena di LKM itu rapat rapat terus, untuk pencairan banyak sekali persyaratan seperti proposal ada kekeliruan, ada laporan keuangan yang kurang lengkap, setelah proposal jadipun realisasinya sangat lama bisa satu tahun kemudian (Sd, 27 Februari 2010)”</i></p> <p>Malah muncul opini yang kurang sehat ditengah masyarakat bahwa pengelolaan PNPM dilakukan dengan tidak profesional. Dan yang menjadi sasaran</p>
--	--	---	--

(Sambungan tabel 5.5...)

			kecurigaan masyarakat adalah pimpinan kolektif LKM dan RT. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Ratujaya belum sepenuhnya menerapkan perencanaan partisipatif seperti yang digariskan dalam panduan PNPM Mandiri.
6.	Kesetaraan dan keadilan gender.	Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. Prinsip ini cukup diberlakukan di LKM Bina Budi Mulya, terlihat dari adanya peran bapak dan ibu dalam program. Program tidak hanya membatasi untuk bapak-bapak tetapi ibu-ibu juga dilibatkan, dengan proporsi 30% dari total semua pimpinan kolektif seperti dalam panduan PNPM Mandiri. Meskipun ibu-ibu tidak konsisten dalam hal keaktifannya, seperti dalam seminggu hanya hadir sekali atau malah tidak pernah hadir sama sekali.	Prinsip ini diberlakukan di PNPM Ratujaya, terlihat dari adanya peran bapak dan ibu dalam program. Program tidak hanya membatasi untuk bapak-bapak tetapi ibu-ibu juga dilibatkan, dengan proporsi 30% dari total semua pimpinan kolektif seperti dalam panduan PNPM Mandiri. Di LKM Ratujaya yang keaktifannya konsisten adalah ibu-ibu.
7.	Demokratis.	Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.	Implementasi prinsip Demokrasi pada LKM Ratujaya belum sepenuhnya berjalan. Pembentukan LKM dilakukan dengan

(Sambungan tabel 5.5...)

		<p>Pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kelurahan Pancoran Mas cukup menjalankan pendekatan secara Demokratis. Ditandai dengan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan dengan musyawarah mufakat, mulai dari pembentukan LKM dan KSM, pemilihan pengurus, penentuan jumlah pinjaman, dll. Pengambilan keputusan dilaksanakan baik dalam pertemuan-pertemuan rutin maupun pertemuan khusus.</p>	<p>Demokratis akan tetapi pembentukan KSM kadang suka bermasalah. Tidak jarang KSM yang dibentuk adalah orang-orang dekat LKM sendiri, bahkan pernah kejadian LKM adalah KSM itu sendiri</p> <p><i>“Pernah kejadian di mana RW juga KSM padahal tidak boleh sebab yang boleh menjadi KSM adalah RT. Bahkan yang fatal ada kejadian anggota LKM sekaligus ketua KSM dan ketua RT”</i></p> <p>Dengan demikian kepentingan orang banyak dalam penyaluran program menjadi terabaikan. Sikap semua pimpinan kolektif LKM yang selalu bersifat menunggu “instruksi” dari koordinator LKM dan masing-masingnya tidak berupaya untuk aktif sebagai pimpinan yang sebetulnya kapasitasnya sama dengan koordinator LKM itu sendiri.</p>
8.	Transparansi dan Akuntabel.	Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral,	Di LKM Ratujaya, transparansi dan akuntabilitas ini agak tercoreng seiring dengan munculnya kecurigaan warga terhadap pengurus LKM tentang dana

(Sambungan tabel 5.5...)

		<p>teknis, legal, maupun administratif. Kondisi ini memungkinkan masyarakat belajar melembagakan sikap tanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam Implementasi program PNPM Mandiri Kelurahan Pancoran Mas, LKM sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang cukup memadai, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut dana bantuan. Semua buku, pencatatan dan dokumen dibuat administrasi yang rapih dan bisa dipertanggungjawabkan.</p>	<p>bantuan pengembangan ekonomi yang diharapkan tidak kunjung cair. Meskipun pengurus LKM sendiri menyatakan bahwa dana bergulir tidak lagi cair adalah karena kemacetan dana bergulir periode sebelumnya. Akan tetapi masyarakat tidak sepenuhnya percaya bahwa kemacetan terjadi karena ulah peminjam. Bisa jadi karena ulah LKM. Di LKM dahulu punya motor dan kamera yang masyarakat tidak mengetahui beli motor memakai uang dari mana. Dan saat ini wujud motor tersebut sudah tidak ada, tidak ada yang tahu dimana motor tersebut saat ini berada.</p> <p><i>“Saya tau, di LKM juga punya motor, punya kamera tetapi tidak tau kemana sekarang” (At, 3 Maret 2010).</i></p>
9.	Prioritas.	<p>Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. Implementasi PNPM Mandiri di LKM Bina Budi Mulya sudah berupaya menjalankan prinsip prioritas ini. Setiap</p>	<p>Pada tataran proses di LKM Ratujaya menjalankan prinsip prioritas, dimana Unit Pelaksana Lapangan melakukan survey terlebih dahulu sebelum proyek. Akan tetapi sering kali rekomendasi yang berasal dari UPL ini tidak berlaku,</p>

(Sambungan tabel 5.5...)

		<p>akan mengadakan proyek terlebih dahulu Unit Pelaksana Lapangan akan melakukan survey tentang kelayakan proyek tersebut. Proyek fisik/pembangunan jalan dilakukan berdasarkan pertimbangan besarnya manfaat yang diperoleh, untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi prioritas untuk dibantu adalah keluarga miskin yang memang tidak memiliki saudara untuk membantu sedangkan kondisi rumahnya sudah mau roboh. Seperti yang dinyatakan oleh UPL LKM Bina Budi Mulya:</p> <p><i>“meskipun daerah sini sudah berada di dalam kepala kami, akan tetapi untuk memberikan suatu proyek kami tetap meninjau lokasi untuk kepastian yang lebih manfaat” (Sr, 5 Februari 2010)</i></p>	<p>keputusan akhir tentang KSM yang layak untuk mendapatkan proyek tetap berada di tangan LKM yang sayangnya setiap keputusan yang diambil tidak berdasarkan kondisi sebenarnya dilapangan. Dan bahkan pernah kejadian dimana suatu KSM memberikan sogokan kepada LKM agar proyek diberikan kepada KSM tersebut. Dan KSM tersebut mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi kualitas suatu proyek.</p> <p><i>“Pernah kejadian suatu KSM fisik yang dibentuk tanpa didahului rebug warga, tanpa memiliki swadaya, pekerjaanya dibayar. Pembuatan jalan mereka ngakalin dengan membuat pinggirnya 7 cm sedangkan tengahnya 5 atau 3 cm, untuk mendapatkan proyek yang “menguntungkan” ini mereka menyogok pimpinan kolektif LKM.” (Ap, 3 Maret 2010)</i></p>
10.	Kolaborasi.	<p>Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Prinsip ini menekankan perlu adanya keran komunikasi yang dibuka dan timbal balik melalui konsultasi antara</p>	<p>Prinsip ini belum tampak dalam implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Ratujaya. Sejauh ini, terjadi hubungan antara masyarakat miskin di wilayah dengan LKM ataupun dengan Kelurahan setempat. Peran swasta</p>



(Sambungan tabel 5.5...)

		<p>masyarakat miskin, pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>Prinsip ini belum sepenuhnya wujud di LKM Bina Budi Mulya, jika kolaborasi dengan masyarakat miskin sudah cukup baik yang dibuktikan dengan tingkat pengembalian yang persentasenya tinggi serta kedekatan masyarakat dengan pengurus LKM yang memang tokoh-tokoh mereka. Akan tetapi hubungan komunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini kelurahan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena lurah memahami bahwa LKM itu adalah tandingan LPM, mestinya ketika LPM sudah ada untuk apa lagi membuat LKM yang terus mendapatkan dana dari pusat dan tidak bisa diintervensi kegiatan-kegiatannya. Sedangkan LPM yang nyata-nyata lembaga resmi kelurahan tidak pernah mendapatkan perhatian apa-apa dari pemerintah. Disamping itu peran pihak swasta juga belum kelihatan. Seperti yang dinyatakan lurah Pancoran Mas:</p> <p><i>“PNPM Mandiri Perkotaan sudah jalan dengan program-programnya, mestinya ada arahan jangan hanya LKM jalan sendiri sebab LPM juga</i></p>	<p>belum terlihat sama sekali dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di LKM Ratujoya.</p>
--	--	---	---

(Sambungan tabel 5.5...)

		<p><i>pemberdayaan masyarakat. Mestinya ada komunikasi antara keduanya. Yang diberikan keuangan untuk mengelola adalah LKM. LPM dan LKM mestinya sejalan bukan malah LPM dianak tirikan” (Mul 2 Maret 2010).</i></p> <p>Begitu juga peran swasta belum terlihat di LKM Bina Budi Mulya.</p>	
11	Keberlanjutan.	<p>Prinsip keberlanjutan dalam pengertian keberlanjutan dana di LKM Bina Budi Mulya sudah berjalan dengan baik. Yang ditandai dengan pengembalian yang tinggi yakni diatas 80%. Akan tetapi keberlanjutan nilai ekonomi saja tentu tidak cukup sebab yang perlu juga ditumbuhkan dalam program PNPM Mandiri adalah nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti jujur, adil, amanah, dll.</p> <p>Jika keberlanjutan hanya terfokus pada keberlanjutan ekonomi saja maka hal ini cepat atau lambat akan memerangkap LKM serta pengurus dalam lingkaran yang tidak putus. Fungsi LKM akan semakin mengerucut menjadi sebuah lembaga keuangan mikro. Sedangkan fungsi utamanya sebagai pusat penggerak dan penumbuhan nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, di tengah-tengah masyarakat setempat menjadi luntur.</p> <p>Dengan demikian prinsip berkelanjutan dalam arti yang sebenarnya belum</p>	<p>Keadaan implementasi program PNPM Mandiri di Kelurahan Ratujaya cenderung memprioritaskan perguliran dana bantuan PNPM Mandiri. Hal ini nampak dari motivasi masyarakat datang berbagai pertemuan yang diadakan yang mereka harapkan setelah pertemuan itu akan ada bantuan dana untuk usaha. Tetapi setelah bantuan yang mereka harapkan belum ada maka tingkat kehadiran masyarakat yang menjadi sasaran program terus menurun dalam setiap pertemuannya. Begitu juga pendapat dari pengurus LKM bahwa menggulirkan dana sebesar mungkin kepada masyarakat akan lebih bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya dan</p>

(Sambungan tabel 5.5...)

		diterapkan di LKM Bina Budi Mulya baru sebatas berkelanjutan dalam pengertian ekonomi.	sekaligus dapat membuat program berkelanjutan. Nilai-nilai luhur kemanusiaan yang menjadi nilai PNPM Mandiri tidak diperhatikan. <i>“Apa yang dikatakan membangun nilai-nilai luhur itu sangat jauh: sebab kenyataan dilapangan sering terjadi penyalahgunaan program untuk mencari keuntungan pribadi secara ekonomi, mungkin saja mereka ikhlas akan tetapi tidak sepenuhnya” (Sd, 27 Maret 2010)</i>
12.	Sederhana.	Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Prinsip ini sudah berjalan di Kelurahan Ratujaya akan tetapi belum sepenuhnya. Prinsip sederhana berjalan dibuktikan dengan pengetahuan masyarakat yang cukup tinggi ketika mereka ditanya tentang PNPM Mandiri dikelurahan mereka. Akan tetapi belum sepenuhnya karena masih ada KSM nakal dimana ketika anggota KSM sudah menyerahkan pengembalian dana bergulir untuk disetor ke LKM, akan tetapi yang bersangkutan tidak menyetor ke LKM. Artinya mekanisme	Prinsip ini belum dapat berjalan karena rendahnya pendidikan masyarakat. Implementasi program secara fleksibel dan sederhana adalah menguntungkan masyarakat tetapi agar masyarakat dapat memahami dengan baik masih membutuhkan waktu pendampingan. Seperti pengalaman ketika masyarakat mendapatkan bantuan dana sosial dari pemerintah dan diutuhkannya swadaya untuk penyelesaian proyek. Tetapi masyarakat memiliki persepsi bahwa pemerintah punya uang dan mereka belum mau tanggung renteng untuk

(Sambungan tabel 5.5...)

		<p>dan prosedur pelaksanaan PNPM Mandiri masih memungkinkan bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan pribadi melalui program.</p>	<p>suatu proyek. Seperti yang dinyatakan oleh seorang LKM, yang pernah menjadi KSM:</p> <p><i>"Masyarakat sudah di geroh-gerohi, ketika kita mau membangun jalan kita senantiasa himbau siapa yang mau nyumbang? Dengan dana stimulan yang hanya 70% sedangkan kebutuhan banyak, rokoknyalah, makannyalah, minumannyalah, tetapi masyarakat senantiasa katakan: kan ada dana dari pemerintah? Mereka sendiri ga muncul kepeduliannya. Mereka taunya duit pemerintah"</i> (Sk, 4 Maret 2010)</p> <p>Begitu juga tentang pengetahuannya mengenai program, ketika mereka ditanya apakah mereka mengetahui program PNPM Mandiri di kelurahan, mereka jawab tidak tahu, akan tetapi ketika ditanya tentang P2KP mereka mengetahuinya. Seperti yang diucapkan oleh seorang informan:</p> <p><i>"PNPM Mandiri belum pernah dengar, saya baru dengar sekarang"</i> (Ng, 7 Maret 2010)</p>
--	--	--	---

## **5.6. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perbedaan Kinerja Pada LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya**

Setelah penulis memaparkan sekilas sejarah kedua LKM beserta kondisi LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya, karakteristik LKM dan evaluasi implementasi prinsip-prinsip PNPM Mandiri di kedua LKM, selanjutnya penulis melakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kinerja pada LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya. Setidaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kinerja LKM pada kasus LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

### **1. Perbedaan Momentum**

PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Pancoran Mas pertama kali masuk tahun 2001 kemudian secara resmi berdiri pada tanggal 18 November 2003. Sedangkan di Kelurahan Ratujaya pertama kali diintervensi pada tahun 1999 dan secara resmi berdiri pada tanggal 23 Maret 2000 dengan SK Notaris Liza Riani, SH. Kemudian mengalami perubahan berdasarkan akta no.4 tanggal 20 September 2000. Intervensi pada tahun 2000 bersamaan dengan kondisi perekonomian yang sedang mengalami krisis. Untuk menghadapi krisis, pemerintah mengambil langkah-langkah taktis diantaranya adalah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PMDKE) yang jalannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya program JPS dan PMDKE adalah kebocoran dan penyimpangan dana. Sehingga ketika program P2KP intervensi saat suasana program JPS dan PMDKE mengalami permasalahan maka P2KP juga mengalami hal yang sama. Sebagaimana JPS dan PMDKE, P2KP di kelurahan Ratujaya juga mengalami permasalahan di dana bergulir. Dana yang dicairkan ke masyarakat banyak yang mengalami kemacetan bahkan pengembalian tidak sampai 80%. Masyarakat menganggap program P2KP sama dengan program JPS dan PMDKE. Ketika program P2KP ada mekanisme yang dirasakan terlalu berbelit untuk mendapatkan dana, maka masyarakat akan segera membandingkan dengan JPS dan PMDKE yang cara memperolehnya tidak serumit

program P2KP. Pengembalian yang tidak mencapai 80% ini menyebabkan Kelurahan Ratujaya tidak lagi mendapatkan dana bergulir untuk periode tahun 2003 ketika intervensi P2KP1-2.

Berbeda halnya dengan di Kelurahan Pancoran Mas, dimana program P2KP1-2 pertama kali masuk pada tahun 2003 dan dana pertama kali cair pada bulan Desember 2004. Pada tahun 2004 program P2KP sudah mengalami perbaikan dan penyempurnaan dari program P2KP1-1. Mekanisme pencairan dana sudah berpedoman kepada buku panduan rencana penanganan kemiskinan 3 tahun (Pronangkis). Bahwa yang mendapatkan prioritas untuk diberikan dana stimulan adalah yang masuk ke dalam buku panduan yang disusun dengan melibatkan semua komponen masyarakat kelurahan. Dengan adanya pedoman Pronangkis maka mekanisme pencairan dana lebih menjamin sampai kesasaran program. Pengembalian dana bergulir untuk kasus di Kelurahan Pancoran Mas lebih dapat berjalan karena tidak ada program lain yang bersamaan seperti JPS dan PMDKE layaknya di Kelurahan Ratujaya.

## 2. Perbedaan Pola Kepemimpinan di Awal Mulai

Intervensi di Kelurahan Pancoran Mas adalah dengan P2KP 1-2 sedangkan intervensi di Kelurahan Ratujaya adalah dengan P2KP 1-1. Faktor yang membedakan antara P2KP 1-1 dengan P2KP 1-2 selain munculnya konsep Pronangkis adalah pola kepemimpinan, P2KP 1-1 pola kepemimpinannya adalah struktural dengan seorang ketua LKM sedangkan P2KP1-2 pola kepemimpinannya adalah kolektif. Ketika terjadi peralihan dari P2KP 1-1 ke P2KP 1-2 di Kelurahan Ratujaya terjadi “kikuk” kepemimpinan karena di Kelurahan Ratujaya sudah terbiasa dengan model kepemimpinan struktural yang dipimpin oleh seorang ketua. Sehingga ketika koordinator yang dipandang sebagai “ketua” LKM jarang hadir, anggota LKM lain yang sebetulnya juga pimpinan kolektif yang kapasitasnya sama dengan koordinator juga jarang hadir.

Berbeda dengan di Kelurahan Pancoran Mas yang tidak mengenal kepemimpinan struktural yang dipimpin oleh seorang ketua LKM. Ketika pertama kali program P2KP 1-2 masuk ke Kelurahan Pancoran Mas, bentuk kepemimpinannya adalah kepemimpinan kolektif. Sehingga tidak ada adaptasi pola kepemimpinan, semua pimpinan kolektif sejak pertama bekerja langsung menyadari bahwa mereka memiliki kapasitas yang sama satu dengan yang lain. Mereka langsung bisa menyadari aktif atau tidaknya LKM tergantung dari keaktifan mereka bukan tergantung keaktifan satu orang koordinator LKM.

### 3. Perbedaan Karakter LKM

Perbedaan karakter LKM ini setidaknya dapat dilihat dari karakter para pimpinan kolektif itu sendiri. Pimpinan kolektif di LKM Bina Budi Mulya didominasi orang-orang yang sudah pensiun sedangkan di LKM Ratujaya para pimpinan kolektifnya rata-rata berusia produktif kerja. Meskipun di LKM Bina Budi Mulya ada pimpinan kolektif yang masih berusia produktif kerja akan tetapi yang sering aktif dan hampir setiap hari datang kesekretariat LKM adalah yang berusia pensiun. Penulis tidak hendak menyatakan bahwa untuk efektifnya jalan LKM maka LKM harus diisi oleh orang-orang yang sudah pensiun. Akan tetapi pertimbangannya lebih kepada faktor ekonomi. Setidaknya pimpinan kolektif di LKM Bina Budi Mulya tidak lagi memusingkan urusan nafkah keluarga lantaran anaknya yang rata-rata sudah bekerja. Mereka yang berusia pensiun dapat dikatakan tinggal menikmati hasil kerja selama ini. Oleh karena itu, keaktifan di LKM justru menjadi suatu keharusan untuk mengisi waktu kosong serta melakukan aktifitas sosial disisa-sisa umur.

Sedangkan di LKM Ratujaya para pimpinan kolektifnya yang masih berusia produktif kerja serta masih harus berfikir nafkah keluarga. Keaktifan di LKM maka waktu untuk mencari nafkah berkurang merupakan harga yang harus dibayar. Sedangkan bagi mereka bekerja mencari nafkah keluarga merupakan suatu kewajiban dengan usia anak-anak yang masih menggantungkan hidup pada orang tua. Oleh

karena itu, kurangnya keaktifan mereka di LKM merupakan fenomena ekonomi tersendiri.

Selain perbedaan karakter pimpinan kolektif LKM, dalam bahasan ini penulis merasa perlu menambahkan pengkajian tentang koordinator LKM. Meskipun dalam hal tugasnya sebagai pimpinan kolektif kapasitas koordinator sama dengan kapasitas pimpinan kolektif yang lain. Fungsi koordinator LKM tidak lebih dari sekedar untuk memudahkan koordinasi dan fungsi administrasi semata (Juknis LKM, tanpa tahun). Akan tetapi sebagai sebuah penelitian sosial yang menggambarkan tentang hubungan-hubungan kejadian ditengah masyarakat serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena maka menambah kajian tentang koordinator LKM terkait dengan *point* perbedaan karakter LKM ini menurut hemat penulis adalah suatu kewajaran.

Koordinator LKM Bina Budi Mulya merupakan seorang tokoh masyarakat yang disegani. Posisinya sebagai tokoh masyarakat yang disegani, latar belakang sebagai Birokrat, jiwa sosial yang tinggi serta didukung oleh mentalitas keagamaan yang kuat membuatnya mampu menjadi fungsi koordinatif antar sesama anggota LKM serta menjadi perekat diantara sesama pimpinan kolektif LKM. Rumah yang bersangkutan yang difungsikan sebagai sekretariat LKM benar-benar berfungsi sebagai kantor yang aktif setiap hari mulai hari Senin hingga Sabtu. Sehingga peran LKM sebagai pengambil kebijakan atau keputusan, penjaga moral dan pengawas atas pengelola yang dilaksanakan oleh unit-unit pengelola dapat dilakukan dengan baik.

Hal itu berbeda dengan pimpinan kolektif LKM Ratujaya. Ketua LKM adalah seorang politisi sebuah partai politik serta pengusaha kontraktor. Koordinator LKM lebih memerankan diri sebagai seorang politisi dan pengusaha.

#### 4. Konflik Internal

Sebagai akibat ketidakpuasan terhadap kinerja LKM maka dalam tubuh LKM Ratujaya terdapat konflik internal khususnya antara pimpinan kolektif dengan koordinator LKM, dan pimpinan kolektif LKM dengan UP. Pimpinan kolektif menanggapi bahwa tanggungjawab LKM ada pada koordinator sehingga



koordinator harus aktif. Tidak aktifnya koordinator mereka anggap sebagai bentuk kurangnya kepedulian koordinator kepada lembaga LKM. Disisi lain, koordinator berpandangan bahwa semua pimpinan kolektif punya kapasitas dan tanggungjawab yang sama. Sehingga kinerja LKM tergantung pada kinerja bersama bukan kinerja satu orang dirinya.

Sedangkan konflik antara UP dengan pimpinan kolektif terjadi dalam hal keputusan yang diambil. UP merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan kolektif tidak berdasarkan kepada usulan yang dia berikan. Bahwa banyak keputusan yang diambil oleh pimpinan LKM tidak berdasarkan survey yang sudah dilakukan oleh UP. Dan bahkan menurut pandangan UP keputusan menurunkan proyek yang diambil oleh pimpinan kolektif lebih banyak berdasarkan pertimbangan kekerabatan baik kekerabatan karena satu RT ataupun kekerabatan karena hubungan famili.

Sedangkan di LKM Bina Budi Mulya tidak terdapat konflik internal, sebab dari awal model kepemimpinan sudah dapat berjalan. Keaktifan pimpinan kolektif setiap hari di kantor LKM merupakan solusi ketika ada persoalan yang menuntut untuk dipecahkan segera. Keaktifan pimpinan kolektif itu juga akan melahirkan komunikasi yang intensif sehingga kepercayaan antara sesama pimpinan kolektif ataupun antara pimpinan kolektif dapat dibentuk.

##### 5. Perbedaan Capaian LKM Saat ini

LKM Bina Budi Mulya sampai saat ini masih mempunyai dana bergulir dan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk stimulan pembangunan fisik dan lingkungan. Disamping itu karena masuk ke dalam kategori LKM berdaya, LKM Bina Budi Mulya mendapatkan beberapa bonus diantaranya program Paket dan Channeling. Sedangkan LKM Ratujaya saat ini hanya memperoleh BLM untuk pembangunan fisik dan sosial. Sedangkan perputaran dana bergulir tidak ada. Disamping itu penilaian kinerja terhadap LKM Ratujaya, kriterianya masuk kedalam kriteria cukup berdaya sehingga belum pernah mendapat bonus berupa paket dan

*channeling*. Dengan capaian, LKM Bina Budi Mulya terdorong lebih aktif daripada LKM Ratujaya.

Kategori LKM Bina Budi Mulya ini sejajar dengan tiga LKM terbaik lainnya di Kota Depok yakni LKM Rangkepan Jaya Baru, LKM Jatijajar dan LKM Tugu. Empat LKM ini saling berlomba untuk mencapai *neighborhood development* (ND) yakni sebuah capaian tertinggi LKM dengan reward mencapai 1 miliar. Perlombaan untuk menjadi yang terbaik di Kota Depok ini juga menjadi faktor lain yang membuatnya semakin aktif.

Demikian pembahasan tentang evaluasi program PNPM Mandiri Perkotaan dengan fokus kajian identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kinerja LKM dengan studi kasus di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya di Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok.

